RENCANA STRATEGIS

2017 – 2022

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG

2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud danTujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 7
2.2 Sumber Daya Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 16
2.3 Kinerja Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 28

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasahalan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 30
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis . 54
3.5 Penetuan Isu-isu Strategis 57

BAB IV TUJUAN,SASARAN, VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 59
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 62
4.3 Strategi dan Kebijakan 79

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 83

BAB VI INDIKATOR KINERJA DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD 91

BAB VII PENUTUP 105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan pilar utama pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Sintang, yang memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar melalui nilai tambah bagi Pendapatan Daerah dan penyerapan lapangan kerja. Selain itu juga berperan dalam transformasi kultural menuju modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing dalam era globalisasi ekonomi. Di tingkat masyarakat, subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah banyak memberikan kesejahteraan ekonomi keluarga. Besarnya kontribusi tersebut dapat dilihat dalam pertumbuhan ekonomi secara riil. Struktur perekonomian Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir masih didominasi oleh tiga sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri.

Pada tahun 2013, ketiga sektor tersebut peranannya mencapai 70,63 persen. Walaupun gabungan peranan ketiga sektor tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2012, namun peranan ketiga sektor tersebut tetap merupakan sektor pemimpin (*leading sector*) bagi pembentukan PDRB Kabupaten Sintang. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar yaitu 33,85 persen, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,13 persen, serta sektor industri pengolahan sebesar 9,65 persen.

Kecenderungan di masa mendatang subsektor ini akan terus menentukkan struktur ekonomi daerah seiring dengan perkembangan Kabupaten Sintang yang cenderung menguat pada sektor tersier (perdagangan dan jasa) dan sektor sekunder (industri, listrik, gas, air bersih dan bangunan) yang merupakan ciri kabupaten yang berkembang. Peran subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan semakin bertambah dengan terus digalinya kompetensi inti daerah yang akan memunculkan keunggulan dan potensi ekonomi kreatif sebagai pemicu inovasi masyarakat.

Meskipun berkontribusi penting dalam perekonomian daerah, subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, subsektor masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang bisa menghambat perkembangannya ke depan, antara lain menyangkut kualitas sumber daya manusia, akses permodalan, aplikasi teknologi, regulasi dan infrastruktur. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dalam urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peran strategis dalam memecahkan permasalahan tersebut sekaligus menjalankan peran sebagai fasiltator, regulator, dan *empowerment* (pemberdayaan). Peran Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah semakin penting bila dikaitkan dengan Visi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021" dan Misi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 khususnya pada point (5)"Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Implementasi peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai daya guna dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam rangka itu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk menjawab bagaimana setiap isu strategis terkait subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dipecahkan. Melalui Renstra, peran aparatur pemerintah sebagai pelayan publik akan lebih jelas, yaitu terlihat pada visi, misi dan nilai-nilai yang menjadi pilar utama dalam pelaksanaan tugas. Visi, misi, dan nilai tersebut akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan sehingga renstra akan lebih operasional.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 merupakan suatu rencana pembangunan daerah yang penyusunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Sintang, dan sinkronisasi terhadap rencana pembangunan lembaga terkait sehingga merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Rencana Strategis merupakan perwujudan dari RPJMD yang akan dijadwalkan ke dalam RKPD dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, mengacu pada landasan hukum sebagai berikut: :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LNRI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.61-400 dan Nomor: 132.61-401 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan 2016-2021;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 050/795/SJ tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra:

1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai dan strategi yang digunakan untuk tercapainya tujuan tersebut oleh SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021).
2. Memberikan fokus (penajaman) dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam dimensi waktu 5 (lima) tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

1. Adanya panduan atau pedoman kerja bagi pimpinan dan unsur pembantu pimpinan beserta seluruh staf dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
3. Menjamin penggunaan sumberdaya secara effisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Agar penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan berjalan efektif sesuai dengan anggaran yang tersedia.
5. Agar tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap program atau kegiatan menjadi lebih jelas dan terukur.
6. Memudahkan pimpinan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing bidang dan sekretariat serta dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal.
7. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan SKPD lainnya, serta mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat tentang latar Belakang Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINTANG

Dalam Bab ini memuat tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Bab ini berisikan tentang permasalahan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga merupakan isu-isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Periode 2016-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada Bab ini mengungkapkan harapan mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 agar **Terwujudnya Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Yang Maju dan Mandiri.**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG

2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Disperindagkop UKM

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang maka Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dengan tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar dan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
c. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan Penyelenggaraan Usaha Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
e. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar,
f. Penyusunan potensi/profil Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
g. Perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur perdagangan,

h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
j. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
k. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
l. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
m. Penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan,
n. Penyusunan sistem pengendalian internal, dan
o. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang terdiri dari Kepala Dinas dibantu Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

a. Kepala Dinas,
b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keungan, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan,
c. Bidang Perindustrian membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Usaha Industri, Seksi Pengembangan Usaha Industri dan Seksi Sarana dan Prasarana teknologi Industri,
d. Bidang Perdagangan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Bina Usaha, Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri, Seksi Sarana Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting dan Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar,
e. Bidang Pasar membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Pasar, Seksi Penataan dan Pengawasan Pasar dan Seksi Pendataan dan Pemberdayaan,

f. Bidang Koperasi dan UMKM membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Seksi Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Seksi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

g. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kemetrologian

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut :

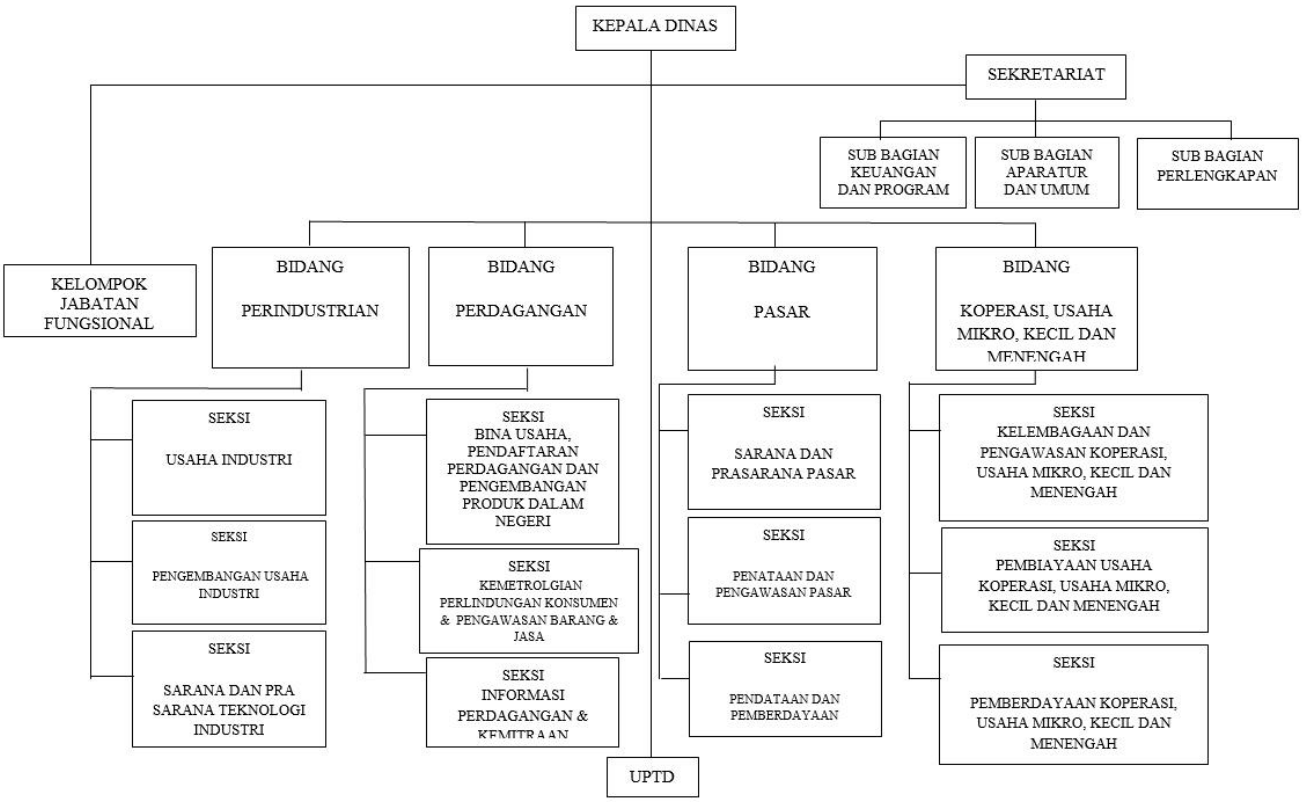

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan tentang tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

   Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

   a. Pemimpin dan pengoordinasian bidang kesekretariatan, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
   b. Penyampaian program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Bupati.
   c. Penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
   d. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
   e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
   f. Penetapan kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
   g. Pelaksanaan sistem pengendalian internal.
   h. Penyampaian hasil analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Bupati.
   i. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati.
   j. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Bupati.
   k. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
   l. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf.
   m. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
   n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatalaksanaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

   Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi:

   a. Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
   b. Penghimpun, pengoordinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
   c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang.
   d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   e. Penghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
   f. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
   g. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
   h. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
   i. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada sub Bagian Keuangan dan Program, sub Bagian Aparatur dan Umum dan sub Bagian Perlengkapan.
   j. Perindustrian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
   k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.
   l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Perindustrian yang meliputi usaha industri, pengembangan usaha industri, sarana dan prasarana industri.

   Adapun fungsi bidang Perindustrian adalah :

a. Penyusunan Petunjuk teknis Operasional pengelolaan perindustrian.
b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kegiatan industri dalam rangka peningkatan dan pengembangan produksi, sarana dan usaha industri.
c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kegiatan industri dalam rangka peningkatan dan pengembangan produksi, sarana dan usaha industri
d. Pelaksanaan penyiapan bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran pengadaan barang industri, peralatan, bahan baku, dan penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.
e. Penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian.
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan pengembangan industri jangka menengah dan panjang.
g. Penyusunan program dan pelaksanaan penumbuhan iklim usaha industri dan mutu industri.
h. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang industri dan rekomendasi Tanda Daftar Industri.
i. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana teknologi industri.
j. Pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana teknologi industri.
k. Pelaksanaan pembentukan dan pemanfaatan bank data dan jaringan informasi sarana dan prasarana teknologi industri.
l. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana teknologi industri.
m. Pelaksanaan penerapan standar, pengawasan, pengendalian dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi industri.
n. Pelaksanaan fasilitasi dan perlusan sumber pembiayaan untuk sarana dan prasarana teknologi industri.
o. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis/ pelatihan penggunaan sarana dan prasarana teknologi industri.
p. Penyediaan fasilitasi dan keringanan tarif pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi industri khususnya pelaku usaha industri kecil.
q. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada seksi sarana dan prasarana teknologi industri.
r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Perdagangan yang meliputi bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan perencanaan dan program kerja bidang Perdagangan.
   b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
   c. Penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
   d. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
   e. Pelaksanaan verifikasi penerbitan izin dan rekomendasi pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern/swalayan.
   f. Pengendalian kegiatan bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
   g. Pelaksanaan pembinaan terhadap usaha niaga untuk dapat lebih berkembang khususnya untuk pedagang kecil dan informal.
   h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi dalam rangka pengadaan dan penyaluran barang.
   i. Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk teknis di bidang bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri dalam rangka pengembangan usaha.
   j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait/asosiasi dunia usaha terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.

k. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran barang beredar.
l. Pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis di bidang kelembangaan usaha perdagangan, perdagangan jasa dan pendaftaraan perusahaan.
m. Pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan.
n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
o. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan, dan
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Pasar mempunyai tugas mambantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Sarana dan Prasarana Pasar, Penataan dan Pengawasan Pasar, dan Pendataan dan Pemberdayaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pasar mempunyai tugas:
   a. Penyusunan program kerja tahunan pada bidang Pasar.
   b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pasar.
   c. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang Pasar meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
   d. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang Pasar.
   e. Pelaksanaan dan penyeleggaraan urusan sarana dan prasarana pasar meliputi survey, kajian analisis, perencanaan tentang pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pasar.
   f. Pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan penataan dan pengawasan pasar meliputi ketertiban, pendaftaran, penempatan, pencabutan undi dan relokasi pasar.
   g. Pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pendataan dan pemberdayaan meliputi penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, registrasi, pendataan dan pemungutan retribusi.
   h. Penyelenggaraan pelayanan umum meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
   i. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Bidang Pasar meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
   j. Perumusan Kebijakan dan Petunjuk Teknis pelaksanaan penataan, keamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.

k. Pengoordinasian urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
l. Pelaksanaan penetapan besaran retribusi pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
m. Pelaksanaan penagihan retribusi pasar.
n. Penyusunan dan penetapan rencana target penerimaan retribusi pasar.
o. Penelitian dan penelaahaan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
p. Penyusunan laporan tahunan bidang Pasar, dan
q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas:
   a. Penyusunan program kerja tahunan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   b. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   c. Penyelenggaraan pembinaan, advokasi dan konsultasi, penyuluhan, pendidikan, pengawasan, pengendalian kelembagaan, usaha dan fasilitasi pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   d. Penyelenggaraan pelayanan pembentukan, fasilitasi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
   e. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana, jaringan lembaga pembiayaan dan sistem penjaminan pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   f. Pemantauan pelaksanaan pengendalian kerjasama atau kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   g. Penyusunan program dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   h. Pengoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat.

i. Penyusunan pedoman, standar, norma dan kriteria pemberian izin di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
j. Pelaksanaan penyusunan kebijakan sistem informasi di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
k. Penerapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
l. Perumusan dan penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada Koperasi.
m. Penyelenggaraan fasilitasi dan memberikan dukungan dalam kerjasama antar Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta kerjasama dengan badan lainnnya.
n. Pelaksanaan pedoman sistem akuntansi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan pemeringkatan koperasi.
o. Pelaksanaan pengembangan, monitoring dan evaluasi di Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
p. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
q. Pelaksanaan pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
r. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
s. Penyusunan laporan tahunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan
t. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keadaan Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sampai dengan Maret 2017 berjumlah 47 (Empat Puluh Tujuh) personil yang terdiri dari Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf, sedangkan kebutuhan berdasarkan peta jabatan sejumlah 46 (empat puluh enam) personil adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Pegawai dari Segi Kepangkatan/Golong Ruang
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1
3.	Pembina (IV/a)	3	1	4
4.	Penata Tingkat I (III/d)	7	5	12
5.	Penata (III/c)	6	1	7
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	5	9
7.	Penata Muda (III/a)	5	3	8
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	-
9.	Pengatur (II/c)	1	1	2
10.	Pengatur Muda (II/b)	3	-	3
	Jumlah			47

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 2.2.1.2
Pendidikan PNS Per Golongan Disperindagkop UKM
Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Golongan	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma D3	Sarjana S1	Pasca Sarjana	
1.	Golongan II	4	1	-	-	5
2.	Golongan III	7	1	21	7	36
3.	Golongan IV	-	-	2	4	6
	Jumlah	11	2	23	11	47

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 2.2.1.3
Pendidikan Pejabat Struktural Disperindagkop UKM
Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Eselon	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma D3	Sarjana S1	Pasca Sarjana	
1.	Eselon II A	-	-	-	-	-
2.	Eselon II B	-	-	-	1	1
3.	Eselon III A	-	-	1	-	1
4.	Eselon III B	-	-	1	3	4
5.	Eselon IV A	1	-	8	7	16
6.	Eselon IV B	-	-	1	-	1
	Jumlah	1	-	11	11	23

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 2.2.1.4
Pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Jenis Diklat Struktural	Jumlah
1.	Adum/Pim IV	12
2.	Adumla/Pim III	4
3.	Kepemimpinan Tk.II	1
	Jumlah	**17**

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 2.2.1.5
Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Jenis Diklat Teknis/Fungsional	Jumlah
1.	Kursus Manajemen Proyek	1
2.	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	10
3.	*Short Course* Akuntansi Koperasi dan UKM	1
4.	PPNS	1
5.	Penyuluh Perindag	3
6.	Bendahara (Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD)	4
7.	Teknik Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Pengelolaan Keuangan Daerah)	3
8.	Kearsipan	3
	Jumlah	**26**

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 2.2.1.6
Posisi Jabatan Struktural/Eselon Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II.B	1
2.	Sekretaris	III.A	1
3.	Kepala Bidang	III.B	4
4.	Kepala Sub Bidang / Kasi	IV.A	16
5.	Kepala Sub Bag TU	IV.B	1
	Jumlah		**23**

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1
Daftar Inventaris Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2017

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Fisik Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung Kantor	1 unit	-	1	-
2.	Kendaraan Roda 4 (empat)	1 buah	1	-	-
3.	Kendaraan Roda 6 (enam)	1 buah	1	-	-
4.	Sepeda Motor	11 buah	9	2	-
5.	Komputer / Pc	8 buah	6	2	-
6.	Komputer Note Book	7 buah	5	-	2
7.	Printer	11 set	8	1	2
8.	UPS	4 buah	4	-	-
9.	Mesin Ketik	3 buah	-	-	3
10.	Meja Rapat	8 buah	8	-	-
11.	Meja Biro/Direksi	6 buah	4	2	-
12.	Meja ½ Biro	52 buah	50	-	2
13.	Kursi Direksi	9 buah	9	-	-
14.	Kursi Rapat dan Kursi Kerja	81 buah	71	10	-
15.	Kursi Tamu (sofa)	4 set	4	-	-
16.	Brankas	2 buah	2	-	-
17.	Telepon	2 buah	1	-	-
18.	Faximile	2 buah	1	-	1
19.	Sound Sistem	2 buah	2	-	-
20.	Lemari Arsip	19 buah	16	3	-
21.	Rak Arsip	4 buah	4	-	-
22.	Filling Cabinet	7 buah	7	-	-
23.	AC	17 buah	11	-	6
24.	Kipas Angin	13 buah	9	3	1
25.	Televisi + Digital	1 set	1	-	-
26.	Dispenser	2 buah	2	-	-
27.	Genset	1 buah	-	1	-
28.	Mesin Potong Rumput	1 buah	-	1	-
29.	Proyektor (infocus)	1 Buah	1	-	-
30.	Handycamp	1 Buah	1	-	-
31.	TOA	1 Buah	1	-	-
32.	Tangga Almunium	2 Buah	1	-	-

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, 2017

2.2.3 Anggaran

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 02 tahun 2008 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Tugas Pembantuan. Anggaran dan realisasi pendanaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.1
Pendanaan Kegiatan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang dari Tahun 2013 s/d 2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Pagu Belanja Daerah	**15.734.660.438**	**22.512.128.019**	**20.749.001.720**	
	a. Belanja Tidak Langsung	3.040.816.438	3.294.965.019	3.558.966.620	
	b. Belanja langsung	12.693.844.000	19.217.163.000	17.190.035.100	
	- Dana Alokasi Umum	10.417.055.000	18.421.333.000	14.957.855.100	
	- Dana Alokasi Khusus	2.276.800.000	795.830.000	2.232.180.000	
2.	Realisasi Belanja Daerah	**10.021.900.244**	**21.529.382.111**	**19.959.688.118**	
	a. Belanja Tidak Langsung	2.873.737.058	2.840.391.015	3.012.529.440	
	b. Belanja langsung	7.148.163.186	18.688.991.096	16.947.158.678	
	- Dana Alokasi Umum	4.871.363.186	17.893.161.096	14.714.978.678	
	- Dana Alokasi Khusus	2.276.800.000	795.830.000	2.232.180.000	

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

Produk program dan kegiatan yang telah dihasilkan selama periode 2016-2021 capaian kinerja yang telah dihasil oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat terlihat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2. Dimana pada Tabel 2.3.1 hasil kinerja Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari Sub bidang Perdagangan rata-rata target rencana kegiatan telah tercapai, hanya pada kegiatan pembangunan pasar di beberapa kecamatan yang belum tercapai dari target yang telah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan dengan belum tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dan adanya pengalihan kegiatan untuk kegiatan penanganan musibah kebakaran pasar pemerintah. Pelaksanaan pembangunan pasar rakyat pembiayaan masih menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan pada kegiatan bidang Industri, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah target rencana kegiatan juga telah tercapai dengan baik, walaupun ada di beberapa kegiatan secara kuantitas realisasi tidak sesuai dengan target yang direncanakan akan tetapi kegiatan tersebut masih bisa dilaksanakn dengan baik seperti kegiatan pelaksanaan pelatihan.

Selanjutnya apabila dilihat dari sisi anggaran (Tabel 2.2.3.1) maka rata rata pencapaian realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tercapai selama lima tahun berkisar 95% – 98% dan pada tahun 2013 pencapaian hanya tereliasasi sebesar 46,76% dan sedangkan Dana Alokasi Khusus

terealisasi selama lima tahun mencapai 100%. Sedangkan Dana Tugas Pembantuan (TP) Disperindagkop dan UKM Kabupaten baru dipercaya untuk mengelola pada tahun 2015 sebesar Rp.8.000.000.000,- dan terealisasi sebesar 86,46%. Untuk rata-rata besaran Jumlah Dana Alokasi Khusus oleh Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang yang dikelola sebesar Rp. 11,029 Milyar dan Dana DAK sebesar Rp. 1,438 Milyar.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang

No	Indikator Kinerja sesuaiTugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainya	Satuan	Target Rencana SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	**Perdagangan**																			
1.	Tersedianya Data Prognosa Kebutuhan Pokok				Buku	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Stabilitas Harga Pupuk dan BBM				Buku	0	5	10	0	10	0	0	10	0	10	-	0%	100%	-	100%
3.	Tersedianya Laporan Pengawasan				Buku	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Tersedianya data Penggunaan Alat UTTP				Buku	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	200%
5.	Terlaksananya Pengendalian Harga melalui OP				Kali	2	2	3	4	3	2	0	3	4	3	100%	0%	100%	100%	100%
6.	Terbangunnya Kios Pasar di Kec. Ambalau				Kios	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0	100%	-	-	-	0%
7.	Terbangunnnya Kios Pasar Inpres Melingkar				Kios	0	210	0	0	210	0	0	0	0	267	-	0%	-	-	127%
8.	Terbangunanya Pasar Baning Kota & Sungai Ana				Kios	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%
9.	Terbangunnya Pasar Desa di 6 Desa				Kios	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%
10.	Terbangunya Pasar Babi				Kios	0	16	0	0	16	0	10	0	0	0	-	63%	-	-	0%
11.	Terbangunnya Pasar Sayur Sungai Durian				Kios	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%
12.	Terbangunnya Pasar Komplek RS Rujukan				Kios	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%

No	Indikator Kinerja sesuaiTugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainya	Satuan	Target Rencana SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13.	Terbangunnya Pasar Buah Terminal S.Durian				Kios	0	72	0	36	0	0	0	0	36	0	-	0%	-	100%	-
15.	Terbangunya Pasar Junjung Buih				Paket	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-	100%	-	-
16.	Terbangunan Pasar Kapuas Kanan hilir				Kios	16	24	0	0	0	16	24	0	0	0	100%	100%	-	-	-
17.	Terbangunya Pasar Merakai				Kios	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	-	-	100%	-	-
18.	Terbangunnya Pasar Kios Desa Emparu				Kios	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	-	-	-	100%	-
19.	Tersedianya Laporan Pendataan PKL				Buku	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%
20.	Terbangunnya Pasar Los Sungai Durian				Los	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	-	-	-	-	100%
21.	Tersedianya data dan informasi pembinaan				Buku	8	8	0	0	0	8	8	0	0	0	100%	100%	-	-	-
22.	Terlaksananya Promosi Produk IKM				Event	3	1	1	0	0	3	1	1	0	0	100%	100%	100%	-	-
23.	Tersedianya data Produk AMDK dan AMIU				Sampel	5	20	50	10	0	5	20	50	10	0	100%	100%	100%	100%	-
24.	Tersedianya Data Pengawasan dan Pengujian Mutu Produk Makanan dan Minuman				Sampel	20	50	50	20	0	20	50	50	20	0	100%	100%	100%	100%	-
25.	Tersedianya Buku Profil Perusahaan				Buku	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%
26.	Tersedianya data Pengawasan Perizinan				Buku	10	16	10	14	14	10	16	10	14	14	100%	100%	100%	100%	100%
B.	**Bidang Koperasi dan UMKM**																			
1.	Meningkatnya Kemampuan berwirausaha pada usaha Mikro				Orang	30	30	30	30	30	0	25	25	30	0	0%	83%	83%	100%	0%

No	Indikator Kinerja sesuaiTugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainya	Satuan	Target Rencana SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pengelola koperasi				Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya Perjanjian kerjasama kemitraan				Orang	40	40	40	40	40	0	0	40	40	0	0%	0%	100%	100%	0%
4.	Terlaksananya Promosi Produk UMKM				Event	2	2	2	2	2	1	1	2	0	2	50%	50%	100%	0%	100%
5.	Tersedianya Informasi Dana bergulir				Koperasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
					LKM	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
					UMKM	80	80	80	80	80	80	80	80	45	0	100%	100%	100%	56%	0%
6.	Meningkatnya Kemampuan Pembina Penggerak Ekonomi Rakyat				Orang	60	60	60	60	60	50	0	0	0	0	83%	0%	0%	0%	0%
7.	Meningkatnya pemahaman thd UU 17/2012				Orang	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	-	-	-	100%	-
8.	Meningkatnya kemampuan UMKM Usaha Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil				Orang	10	10	10	10	10	0	0	5	0	0	0%	0%	50%	0%	0%
9.	Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran KUMK				Unit/Pkt	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0%	0%	-	100%	-
10.	Meningkatnya kemampuan pengawas koperasi				Orang	40	40	40	40	40	30	30	25	25	30	75%	75%	63%	63%	75%
11.	Tersedianya Buku Kelengkapan Administrasi				Set	55	0	55	15	0	0	0	17	15	0	0%	-	31%	100%	-
12.	Terlaksananya Pembinaan Pengawas dan Peng hargaan Koperasi Berprestasi				Koperasi	13	12	13	13	10	13	12	13	13	10	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Meningkatkanya Kualitas Pengelola KSP/USP				KSP/USP	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	-	-	-	100%	-

No	Indikator Kinerja sesuaiTugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainya	Satuan	Target Rencana SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14.	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Klasifikasi Koperasi				Koperasi	0	50	19	0	11	0	0	19	0	11	-	0%	100%	-	100%
15.	Fasilitasi Kemudahan Pembiayaan UMKM				Orang	50	50	50	50	50	0	0	50	50	0	0%	0%	100%	100%	0%
16.	Meningkatnya kemampuan Koperasi dan UMK dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan				Orang	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	-	-	100%	-	-
17.	Meningkatnya kemampuan Pengawas Koperasi				orang	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	-	-	100%	-	-
18.	Terlaksananya Pembinaan Pengawas Koperasi Penerima Bantuan PLTMH/KPDT				Koperasi	0	0	1	1	4	0	0	1	1	4	-	-	100%	100%	100%
C.	**Bidang Perindustrian**																			
1.	Tercapainya kemampuan pengrajin dalam mengelola Bata Merah				Orang	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
2.	Tecapainya Kemampuan Bimtek Pandai Besi				Orang	0	20	20	20	20	0	20	15	15	0	-	100%	75%	75%	0%
3.	Terlatihnya Pelaku Usaha Industri Kecil Pengolahan Makanan				Orang	0	20	35	20	20	0	20	35	0	0	-	100%	100%	0%	0%
4.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan IRT				Klp	0	0	0	5	6	0	0	0	5	6	-	-	-	100%	100%
5.	Terlaksananya Promosi Produk Kerajinan Rakyat				Event	2	0	1	1	4	2	0	1	1	4	100%	-	100%	100%	100%
6.	Tersedianya Data Informasi Penyuluhan				Buku	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Tersedianya SDM Pengrajin Meubel Kayu				Orang	4	0	6	0	0	4	0	6	0	0	100%	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja sesuaiTugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainya	Satuan	Target Rencana SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.	Terlatihnya pelaku usaha gula aren				Orang	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	100%	-	-	-	-
9.	Terlatih pengrajin bordir dan tenun ikat				Orang	30	30	30	30	30	30	20	30	0	0	100%	67%	100%	0%	0%
10.	Terlatihnya pengrajin rotan				Orang	0	20	10	20	0	0	20	10	20	0	-	100%	100%	100%	-
11.	Tercapainya kemampuan Kelompok Pengolahan Teknologi Minyak Asiri				Unit/Pkt	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0%	0%	-	100%	-
12.	Tersedianya data industri				Buku	50	6	20	0	10	50	6	20	0	10	100%	100%	100%	-	100%
13.	Tersedianya bangunan penunjang workshop pupuk kompos				unit	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	100%	-	0%	0%	-
14.	Tercapainya penyediaan sarana pelaku IKM				Klp	0	10	10	10	0	0	10	10	0	10	-	100%	100%	0%	-
15.	Terlatihnya latihan kerja bagi pelaku IKM				Orang	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	-	-	100%	-	-
16.	Tercapainya penambahan sarana prasarana Galeri				Paket	0	0	6	8	0	0	0	6	8	0	-	-	100%	100%	-
17.	Terlatihnya Pelaku Usaha IKM dalam pengelolaan tahu				Orang	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	-	-	-	-	100%
18.	Terlaksananya pemberian sertifkat Halal				Orang	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	-	-	-	-	100%
19.	Tercapainya peningkatan kualitas GKM				Konpeksi	2	2	2	2	2	2	1	1	0	1	100%	50%	50%	0%	50%
20.	Terlaksananya Pengawasan dan pengujian				Sampel	0	0	10	10	10	0	0	10	10	10	-	-	100%	100%	100%
21.	Terlatihnya pelaku IKM garam				Orang	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	-	-	-	100%	-

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang

(Dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DAU	7.458.339,39	3.841.636,5	10.417.044	18.421.333	14.957.855,1	7.243.057,182	3.670.770,961	4.871.363,186	17.893.161,096	14.714.978,678	97,11	95,55	46,76	97,13	98,38	11.019.241,59	9.678.666.221
DAK	897.300	989.540	2.276.800	795.830	2.232.180	897.300	989.540	2.276.800	795.830	2.232.180	100	100	100	100	100	1.438.330	5.405.906.000
TP	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	6.916.527,8	0	0	0	0	86,46	1.600.000	1.383.305.560

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperindagkop UKM

2.4.1 Tantangan

1. Melihat pelaku usaha UMKM khususnya untuk usaha mikro dan kecil dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha ekonomis, dengan badan usaha perseorangan kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan legalitas usaha dan administrasi yang tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM semakin rumit karena jumlah dan jangkauan demikian banyak dan luas terlebih di daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.
2. Lemahnya kelembagaan pada Koperasi karena rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus, maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan tidak saja jika dilihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi tetapi juga dapat dilihat dan rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi Aktif.
3. Kapasitas dan kualitas para pengelola Koperasi, sebagaian besar masih sangat rendah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri Koperasi. Semakin memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dan legalitas tidak memadai.
4. Koperasi dan UMKM menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia, kebanyakan SDM koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompentensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya selain itu kurangnya lembaga pengembangan usaha, lembaga diklat dan inkubator.
5. Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama pada bahan baku, permodalan, teknologi serta informasi pasar. Kondisi ini berakibat terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing.
6. Keberadaan aparatur dari sisi jumlah dan keterampilan / keahlian dan sarana dan prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan koperasi dan UMKM.
7. Rendahnya kesadaran para pengusaha mentaati peraturan bidang perizinan usaha perdagangan yang berlaku.
8. Semaraknya peredaran produk dari luar maupun lokal yang tidak memenuhi standar SNI.
9. Semakin maraknya usaha air minum isi ulang dan air minum dalam kemasan.
10. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan SDM bagi pelaku IKM.
11. Pelaku IKM kurang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
12. Keterbatasan modal usaha yang dimiliki pelaku IKM sehingga usaha yang dilakukan hanya memperbanyak usaha sampingan.

13. Masih banyak produk-produk IKM yang belum memiliki hak paten.

2.4.2 Peluang

1. Tingginya komitmen dan dukungan politik masyarakat, Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian.
2. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik karena didukung stabilitas politik dan keamanan.
3. Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang terletak di Wilayah Timur Propinsi Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan luar negeri akan membuka peluang perdagangan barang dan jasa bagi koperasi dan UMKM, produk IKM terutama produk unggulan daerah dan produk kreatif
4. Potensi permodalan yang terbuka luas untuk menjadikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro dari skim kredit pemerintah dan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.
5. Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM sehingga dapat meningkatkan perannya sebegai penggerak utama pertumbuhan kerajinan, ekspor non migas dan penciptaan lapangan kerja baru.
6. Meningkatnya jumlah usaha dan perdagangan bebas memungkinkan Kabupaten Sintang menjadi jalur ekspor dan impor sehingga pengusaha maupun berdaya saing global.
7. Banyaknya investasi yang masuk ke Kabupaten Sintang.
8. Dengan diberlakukan perdagangan bebas telah memperluas gerak arus transaksi barang melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga barang yang dikirimkan bervariasi baik produk dalam maupun luar negeri.
9. Banyaknya permintaan produk IKM.
10. Adanya teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan pelaku IKM untuk meningkatkan produk baik kualitas maupun kuatintas.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

Penyelenggaraan pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang tidak terlepas dari berbagai permasalahan, baik permasalahan umum unit kerja maupun permasalahan spesifik bidang pada Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang. Ada beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi, antara lain:

Tabel 3.1.1
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Disperindagkop Kabupaten Sintang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya Bidang Industri

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
.	**Penciptaan Iklim Usaha IKM**			
1.	Sosialisasi IKM	Belum semua Kabupaten terbentuknya kelompok IKM	Fasilitas dan pelayanan pada kelompok IKM	Dengan adanya sosialisasi membuka pelayanan pada IKM lebih baik
2.	Bimtek bagi Kelompok IKM	Kurangnya pembinaan dan pemberdayaan IKM	Belum adanya kerjasama kelompok IKM	Adanya kemauan untuk mengadakan perbaikan dan perubahan
3.	Rintisan pengembangan OVOP (One Villege One Product)	Kurangnya sosialisasi OVOP	Belum semuanya desa mempunyai produk unggulan	Adanya kesadaran IKM untuk mengikuti pelatihan
4.	Fasilitasi dan Perkuatan Kemitraan Kelompok IKM	Kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran	Adanya kesadaran IKM untuk peningkatan SDM
II.	**Pengembangan dan Keunggulan Kompetitif IKM**			
1.	Terlaksananya pelatihan kelompok IKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya anggaran pembangunan	Adanya kesadaran IKM untuk mengikuti pelatihan
2.	Peningkatan Kualitas SDM	Masihnya rendahnya kualitas pelatihan	Kapasitas SDM	Adanya kesadaran IKM untuk peningkatan SDM
3.	Terlaksananya pelatihan HAKI bagi kewirausahaan	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Adanya kesadaran IKM untuk mengikuti pelatihan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
III.	**Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi IKM**			
1.	Fasilitasi Promosi Produk IKM	Fasilitas Pemerintah terbatas	Terbatasnya anggaran pembangunan	IKM lebih aktif membuka peluang
2.	Fasilitas Pasar Rakyat	Fasilitas pemerintah terbatas	Terbatasnya anggaran pembangunan	Adanya produk unggulan daerah
3.	Pengembangan Usaha bagi IKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian IKM
4.	Sosialisasi pembinaan IKM	Kurangnya sosialisasi	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian IKM
5.	Bimtek Pengembangan Usaha IKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian IKM
6.	Penyelenggaraan Promosi Produk IKM	Kemampuan menyelenggarakan promosi terbatas	Terbatasnya anggaran pembangunan	Peran serta swasta dan pemerintah
7.	Fasilitasi Pemasaran melalui Galeri dan Pasar Tradisional	Galeri dan pasar tradisional terbatas	Terbatasnya anggaran pembangunan	Peran serta swasta dan pemerintah
8.	Pembangunan IKM, Sentra IKM dan Utilitasnya	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian IKM
IV.	**Peningkatan Kualitas Pengembangan IMK**			
1.	Pemberdayaan IKM melalui Dekranasda	Kurangnya peran serta Dekranasda	Koordinasi lemah	Fungsi dan peran Dekranasda
2.	Pembinaan dan Pengembangan IKM berprestasi	Kurangnya pembinaan penghargaan yang diberikan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Motivasi bagi IKM

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 3.1.2

Permasalahan Pelayanan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan Bidang Perdagangan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I.	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**			
1.	Peningkatan pengawasan barang dan jasa	Barang dan jasa yang beredar tidak sesuai dengan aturan/ketentuan perdagangan	Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	1. Pembentukan tim pengawasan terpadu melibatkan dinas instansi terkait 2. Sosialisasi tentang peraturan peundang-undangan
2.	Pengawasan Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Lemahnya penggunaan alat UTTP yang tidak akurat	Belum tersedianya SDM dibidang kemetrologian	Pengadaan SDM dibidang kemetrologian
3.	Monitoring/ Pemantauan Produk AMDK/ AMIU dan Pemasarannya.	Banyaknya pelaku usaha DAMIU yang tidak melaksanakan aturan/ketentuan yang berlaku	Kurangnya koordinasi dinas instansi terkait	1. Pembentukan tim pengawasan DAMIU 2. Terciptanya persaingan usaha yang sehat 3. Terjaminnya mutu produk DAMIU
4.	Pemantauan Produk Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib	Banyaknya barang beredar yang tidak bertanda SNI	Kapasitas SDM yang terbatas (PPBJ-PK)	1. Pengadaan SDM PPBJ-PK melalui Diklat 2. Produk yang beredar berstandar SNI
5.	Monitoring dan Pemantauan produk Kadarluasa dan kelengkapan Label	Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang aturan pelabelan	Tidak tersedianya anggaran	Pembentukan tim pengawasan
		Baanyaknya barang beredar yang tidak sesuai dengan aturan pelabelan	Kurangnya koordinasi dinas instansi terkair	Sosialisasi tentang peraturan pelabelan
			Belum tersedianya SDM (PPBJ-PK)	Pengadaan SDM PPBJ-PK melalui Diklat
6.	Pengawasan Distribusi penyaluran pupuk dan BBM Bersubsidi	Kurangnya Informasi / Laporan Distributor Terkait Stock BBM dan Pupuk Bersubsidi yang disampaikan Dinas Instansi terkait	Lemahnya Pengawasan terhadap Distribusi Pupuk dan BBM yang ada dibeberapa Kec. Dan terbatasnya Anggaran	Perlunya dilakukan Monitoring dan Pemantauan Distribusi Pupuk dan BBM Bersubsidi di Beberapa Kecamatan yang rawan terhadap akses distribusi

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
7.	Pembentukan BPSK	Banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen Belum terlaksananya seleksi pemilihan anggota BPSK	Belum terbentuknya BPSK	Membentuk BPSK
8.	Pengadaan Sarana dan Prasarana BPSK	Belum tersedianya sarana dan prasarana BPSK	Terbatasnya anggaran	Tersedianya tempat (Ruangan) Pelayanan BPSK
9.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Banyaknya permasalahan (Kasus-kasus) antara pelaku usaha dan konsumen	Belum terbentuknya lembaga perlindungan konsonsumen	1. Pengadaan SDM PPBJ-PK melalui Diklat 2. Membentuk lembaga perlindungan konsumen
10.	Sosialisasi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Kuranggya pengetahuan pelaku usaha/konsumen tentang peraturan perundang-undangan	Terbatasnya anggaran	Perlu dilakukan sosialisasi UU No.8 Tahun 1999
11.	Forum Konsumen Cerdas	Belum terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pada konsumen	Terbatasnya pemahaman konsumen tentang perlindungan konsumen	Pembentukan kelompok Konsumen Cerdas
12.	Operasi Pasar	Tidak Stabilnya Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Pasaran	Terbatasnya Anggaran dan Tidak terjangkaunya Lokasi	Tingginya Tingkat Rata-Rata Harga Kebutuhan Pokok Di Pasaran
13.	Pasar Murah (Fasilitasi Pasar Murah)	Tidak Stabilnya Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Pasaran	Terbatasnya Anggaran dan Tidak terjangkaunya Lokasi	Tingginya Tingkat Rata-Rata Harga Kebutuhan Pokok Di Pasaran
14.	Monitoring harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya	Terjadinya Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok di Pasaran	Lemahnya Pengawasan Terhadap Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Perlu dilakukan Pengawasan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis Lainnya
II.	**Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri**			
1.	Pembangunan Gedung UPT Metrologi Legal	Belum tersedianya gedung UPT	Terbatasnya anggaran	Pembangunan gedung UPT Metrologi Legal
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Metrologi Legal	Belum tersedianya sarana dan prasarana di UPTD METROLOGI LEGAL	Terbatasnya anggaran	Pembangunan gedung UPT Metrologi Legal
3.	Sosialisasi UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal	Kurangnya pengetahuan pelaku usaha/konsumen tentang METROLOGI LEGAL	Terbatasnya anggaran	Perlunya dilakukan sosialisasi

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4.	Pendataan Alat UTTP dan Kelengkapannya	Belum terlaksananya pendataan secara keseluruhan, sehingga data alat UTTP yang ada belum akurat	Terbatasnya anggaran	Melaksanakan pendataan ke pengguna alat UTTP (Pelaku Usaha,BUMN,BUMD, Perusahaan)
5.	Pembentukan Pasar Tertib Ukur	Alat UTTP yang digunakan pelaku usaha belum bertanda tera sah	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengguna alat UTTP Tidak tersedianya anggaran pembentukan pasar tertib ukur	1. Terjaminnya kebenaran pengukuran dan tertib niaga 2. Pembentukan pasar tertib ukur 3. Perlu mengangarkan dana pembentikan pasar tertib ukur
6.	Tera-tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang	Banyaknya alat UTTP yang belum bertanda tera sah	Kurangnya kesadran pelaku usaha terhadap penggunaan alat UTTP Belum tersedianya SDM Penera Belum berfungsinya UPT Metrologi Legal	Terlaksananya pelaksanaan tera-tera ulang Pengadaan SDM/Diklat Penera Memfungsikan UPT Metrologi di Kabupaten Sintang
7.	Penyelenggaraan Promosi Produk Dalam Negeri	Rendahnya Promosi Produk Unggulan IKM	Terbatasnya Anggaran	Adanyan Usaha untuk melakukan Event Promosi baik di Tingkat Nasional maupun Internasional
8.	Penyusunan Prognosa dan Pemantauan Stock Sembako	Tidak Tersedianya Data Stock Sembako dan Data Pola Konsumsi Masyarakat Terhadap Kebutuhan Pokok	Terbatasnya informasi dari Pelaku Usaha	Terjalinnya Kerjasama antara Pelaku Usaha dengan Pemerintah
9.	Pendataan Kemitraan	Belum terlaksananya Kegiatan Pendataan Kemitraan	Terbatasnya Anggaran	Banyaknya Lembaga Keuangan dan Toko Modern yang membuka Peluang untuk Melakukan Kemitraan
10.	Kemitraan (Match Making) dunia usaha antara pelaku usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Besar	Belum terlaksananya Kegiatan Pendataan Kemitraan	Terbatasnya Anggaran	Terciptanya Kerjasama Antara Pelaku Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Besar
11.	Pengembangan database informasi potensi unggulan	Belum Tersedianya Data Potensi Unggulan	Terbatasnya Anggaran	Adanya Peningkatan Potensi Unggulan Daerah
12.	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi (gudang non SRG)	Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana Gudang untuk mengantisipasi sarana distribusi kebutuhan bahan pokok	Terbatasnya Anggaran yang tersedia untuk melakukan pembinaan terhadap sarana dan prasarana gudang	Perlu dilakukan Diklat Teknis

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
13.	Monitoring dan Pengawasan perizinan	Lemahnya perizinan yang tidak didukung secara online maupun manual	Lemahnya Sarana dan Prasarana Pendukung serta Kapasitas SDM yang terbatas	Adanya upaya pelayanan tepat waktu dan transparan dan akuntabel.
14.	Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol	Lemahnya Pelayanan Perizinan terkait Perda yang mendukung Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol	Belum dilakukannya Kajian terhadap Distribusi dan Peredaran yang diatur dalam Perda	Perlu dibuat suatu strudi banding terhadap pembuatan dan Rancangan Perda Khusus Minuman Beralkohol.
15.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Meningkatkan Pengetahuan Pelaku Usaha Dalam Menggunakan Sarana Teknologi Informasi untuk mempromosikan Produknya.	Terbatasnya Anggaran	Banyaknya Jumlah UMKM dan IKM
III.	**Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional**			
1.	Sosialisasi Forum Pertemuan Perdagangan Luar Negeri	Belum diberlakukannya Perdagangan Lintas Batas terkait Perdagangan Luar Negeri	Rendahnya Pengetahuan tentang Perdagangan Luar Negeri bagi Kalangan Dunia Usaha	Perlu dilakukannya Sosialisasi terkait Ketentuan dan Peraturan Perdagangan Luar Negeri berkenaan Eksport Import
IV.	**Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**			
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Belum berfungsinya Pasar milik Pemerintah	Terbatasnya Anggaran Pembangunan	Adanya Pasar milik Pemerintah di Kecamatan
2.	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan	Belum berfungsinya Pasar milik Pemerintah	Terbatasnya Anggaran Pembangunan	Adanya Pasar milik Pemerintah di Kecamatan
3.	Pemasangan Jaringan Listrik Pasar Pemerintah	Infrastruktur jaringan listrik tidak memadai	Kapasitas daya tidak mencukupi	Rencana menganggarkan pemasangan jaringan dan gardu
4.	Penyusunan Kajian Akademik Draft Raperda tentang Pasar	Belum tersusunnya raperda tentang pasar	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
5.	Kaji Terap Perda tentang Pengelolaan Pasar	Kemampuan SDM yang masih rendah	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
6.	Penyusunan Kajian Pembangunan, Penataan, dan Pengelolaan Pasar	Kemampuan SDM yang masih rendah	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
7.	Pembinaan Pengguna Fasilitas Pasar Pemerintah	Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas pasar pemerintah	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
8.	Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar	Kurangnya staf teknis perencana pembangunan pasar	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
9.	Penetapan Kawasan Sentra PKL	Belum ada Perda tentang PKL	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
10.	Penyusunan Perbup tentang Pembentukan UPTD Pasar	Belum ada Perbup tentang UPTD Pasar	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
11.	Pendataan dan Pelayanan Restribusi, Pasar, Grosir dan Pertokoan	Kurangnya staf teknis	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
12.	Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan Retribusi, Pasar, Grosir dan Pertokoan	Belum adanya sistem informasi	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
V.	**Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**			
1.	Pendataan, Penataan dan Fasilitasi bagi PKL dan Asongan	Kurangnya petugas penataan	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan
2.	Penyuluhan PKL dan Asongan	Kurangnya tenaga penyuluh	Belum teranggarkan	Sudah dibuat perencanaan

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 3.1.3
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Bidang Koperasi dan UMKM

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten / Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kemampuan UMKM dalam berwirausaha	Terbatasnya kemampuan aparatur dan fasilitas pemerintah yang kurang menunjang	Terbatasnya kemampuan aparatur dan fasilitas pemerintah yang kurang menunjang	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berwirausaha
2	Meningkatkan kemampuan UMKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
3	Meningkatkan kemampuan UMKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
4	Meningkatkan kemampuan UMKM dalam fasilitasi lembaga pembiayaan	Kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	peran serta perbankan dan aktifnya KUKM membuka peluang
5	Meningkatkan kemampuan UMKM dalam fasilitasi lembaga pembiayaan	Kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	peran serta perbankan dan aktifnya KUKM membuka peluang
6	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
7	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
8	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
9	Terlaksananya promosi produk UMKM	Fasilitas pemerintah terbatas	Terbatasnya anggaran	produk upaya UMKM masih diminati
10	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
11	Terlaksananya sosialisasi tentang HKI bagi UMKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	adanya kesadaran Koperasi melaksanakan pendidikan mandiri melalui dana pendidikan
12	Meningkatkan kemampuan pelaku UMKM	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Terbatasnya kemampuan pemerintah	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
13	Meningkatkan kemampuan manajerial bagi pengelola koperasi dan KUD	Lemahnya penataan administrasi dan manajemen koperasi	Kapasitas SDM sumber pembiayaan	Kemandirian koperasi dan UMKM
14	Meningkatkan kemampuan modal usaha bagi UMKM	kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	KUKM lebih aktif membuka peluang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten / Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
15	Berkembangnya klaster bisnis bagi UMKM	Kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	Meningkatnya kesadaran KUMKM dalam mencari peluang usaha
16	Terlaksananya pemasaran produk UMKM	Fasilitas pemerintah terbatas	Terbatasnya anggaran	produk upaya UMKM masih diminati
17	Terlaksananya promosi produk UMKM	Fasilitas pemerintah terbatas	Terbatasnya anggaran	produk upaya UMKM masih diminati
18	Tersedianya informasi dan data peminjam	Lemahnya monitoring dan fasilitas pemerintah	Terbatasnya anggaran	Kesadaran peminjam akan kewajibannya
19	Meningkatkan SDM usaha penggerak ekonomi kerakyatan	kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	KUKM lebih aktif membuka peluang
20	Meningkatkan kemampuan SDM bagi UMKM	kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	KUKM lebih aktif membuka peluang
21	Meningkatkan sarana dan prasarana koperasi	Kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran penunjang	Meningkatnya kesadaran Koperasi dalam meningkatkan kualitas koperasi
22	Tersedianya informasi dan data UMKM	Terbatasnya dana dan fasilitas pemerintah	Terbatasnya dana dan fasilitas pemerintah	Kesadaran UMKM dalam mencari peluang kemitraan dan permodalan
23	Meningkatkan pelayanan bagi KUMKM	kurangnya fasilitas	kurangnya fasilitas	Aparatur yang terlatih
24	Tersedianya data kebijakan dan program pembangunan koperasi	Kurangnya sosialisasi	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian koperasi dan UMKM
25	Adanya personel auditing bagi pengawasan koperasi	Terbatasnya kemampuan pemerintah melaksanakan diklat dan fungsi pengawas koperasi belum efektif	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Kemandirian Koperasi dan UMKM
26	Adanya informasi bagi Pengelola Koperasi tentang pengembangan perkoperasian	Kurangnya sosialisasi	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian koperasi dan UMKM
27	Terlaksananya sosialisasi prinsif - prinsif pemahaman perkoperasian	Kurangnya sosialisasi	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian koperasi dan UMKM

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten / Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
28	Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan koperasi	Terbatasnya kemampuan pemerintah melaksanakan diklat dan fungsi pengawas koperasi belum efektif	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Kemandirian Koperasi dan UMKM
29	Meningkatkan jaringan kerjasama usaha koperasi	Kemitraan koperasi masih terbatas	Usaha yang dimitrakan terbatas	Kemitraan meningkatkan perkembangan usaha
30	Mengembangkan model pola perkoperasian	Kurangnya sosialisasi	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian koperasi dan UMKM
31	Menerapkan tekhnologi/manajemen modern dalam usaha koperasi	Terbatasnya dana dan fasilitas pemerintah	Terbatasnya dana dan fasilitas pemerintah	Kesadaran koperasi dalam penerapan tekhnologi/manajemen modern
32	Meningkatkan usaha koperasi	kurangnya fasilitas	kurangnya fasilitas	Kemandirian koperasi
33	Tersedianya pengelola Koperasi yang terlatih	Terbatasnya kemampuan pemerintah melaksanakan diklat dan fungsi pengelolaan koperasi belum efektif	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Kemandirian Koperasi dan UMKM
34	Adanya data valid tentang perkembangan Koperasi/KUD	Lemahnya monitoring dan fasilitas pemerintah	Terbatasnya anggaran	Kesadaran Koperasi/KUD melaporkan perkembangannya
35	Adanya personel auditing bagi pengawasan koperasi	Terbatasnya kemampuan pemerintah melaksanakan diklat dan fungsi auditing bagi pengawas koperasi belum efektif	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Kemandirian Koperasi dan UMKM
36	Adanya personel akuntan bagi pengawasan koperasi	Terbatasnya kemampuan pemerintah melaksanakan diklat dan fungsi akuntan bagi pengawas koperasi belum efektif	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Kemandirian Koperasi dan UMKM
37	Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi berprestasi	Kurangnya pembinaan pengawasan dan penghargaan yang diberikan	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Motivasi bagi UMKM
38	Menguatkan sistim pendukung usaha bagi UMKM	Terbatasnya anggaran pembangunan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian Koperasi dan UMKM

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten / Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
39	Terselenggaranya pelayanan thp pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi	Terbatasnya anggaran pembangunan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Aparatur yang tersedia
40	Tersedianya personel analisa laporan keuangan	Terbatasnya kemampuan pemerintah melaksanakan diklat dan fungsi analisis bagi pengawas koperasi belum efektif	Terbatasnya anggaran pembangunan dan kapasitas SDM	Aparatur yang tersedia
41	Terselenggaranya pelatihan penyusunan rencana pelatihan usaha bisnis (bisnis plan)	Terbatasnya anggaran pembangunan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian Koperasi dan UMKM
42	Melaksanakan pengawasan koperasi penerima fasilitas bantuan APBD	Terbatasnya anggaran dalam pengawasan	Terbatasnya anggaran pengawasan	Kemandirian Koperasi dan UMKM
43	Melaksanakan monitoring dan evaluasi bansos Kemenkop dan UKM	Terbatasnya anggaran monev	Terbatasnya anggaran monev	Kemandirian Koperasi dan UMKM
44	Menyelenggarakan kegiatan hari Koperasi Nasional, Propinsi dan Kabupaten	Terbatasnya anggaran pembangunan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kemandirian Koperasi dan UMKM dalam mengikuti kegiatan tersebut
45	Adanya peran organisasi gerakan koperasi dalam dunia usaha	Terbatasnya anggaran pembangunan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Adanya peran pelaku usaha dalam membentuk koperasi
46	Menyediakan data koperasi yang valid	Terbatasnya anggaran pembangunan	Terbatasnya anggaran pembangunan	Kesadaran Koperasi dalam melaporkan perkembangan koperasi
47	Meningkatkan kualitas koperasi/KUD sehingga lebih aktif	kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	Koperasi lebih aktif membuka peluang usaha
48	Terselenggaranya IUMK bagi UMK	kurangnya fasilitas	Terbatasnya anggaran pembangunan	Meningkatnya kesadaran UMK akan kelembagaan usahanya

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera tentu melalui tahapan penyelenggaraan pembangunan sebagaimana yang diinginkan setiap Kepala Daerah yang dituangkan dalam Visi, Misi pembangunan. Adapun Visi Kabupaten Sintang periode 2016-2021

sebagai berikut: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021".

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, maka salah satu kebijakan yang akan dijalankan adalah program kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mencerminkan strategi konkret untuk diimplementasikan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Industri terdiri dari ;
   1. Pengembangan industri pengolahan :
      a) Peningkatan industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan (agroindustri)
      b) Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan.
      c) Pengembangan industri pengolahan untuk menciptakan usaha produktif dan kesempatan kerja.
      d) Peningkatan nilai tambah industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.
      e) Peningkatan Kompetensi inti daerah sebagai pengembangan produk unggulan daerah.
      f) Peningkatan sarana dan prasarana industri pengolahan.
      g) Penguatan kemitraan industri sedang/besar dengan industri kecil.
      h) Peningkatan daya saing dan promosi produk industri unggulan daerah.
   2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) ;
      a) Perencanaan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM).
      b) Pembinaan usaha IKM.
      c) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi IKM.
      d) Pengembangan sentra sentra IKM potensial.
      e) Peningkatan peralatan, inovasis produksi dan desain kemasan IKM.
      f) Peningkatan kapasitas produksi dan promosi produk IKM.
      g) Peningkatan kegiatan pelatihan bagi IKM.
      h) Fasilitas pembiayaan usaha IKM pada perbankan.
      i) Fasilitas kerjasama kemitraan dengan perusahaan menengah / besar.
   3. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi ;
      a) Pembinaan kemampuan teknologi industri.
      b) Pengembangan teknologi tepat guna (TTG).
      c) Pelatihan keterampilan usaha pada industri kerajinan dan industri rumah tangga.

d) Pembinaan dan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.
e) Bantuan peralatan.

b. Peningkatan Perdagangan terdiri dari :

1. Pengembangan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
   a) Sosialisasi dan desiminasi UU / Peraturan tentang Perlindungan Konsumen.
   b) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
   c) Monitoring, distribusi, ketersediaan dan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya.
   d) Peningkatan pengawasan barang dan jasa.
   e) Pengembangan pemasaran hasil produksi daerah.
   f) Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan.
   g) Kerjasama pemasaran komoditi potensi daerah.
   h) Sertifikasi mutu barang / mutu komoditi dan peningkatan pelayanan sertifikasi.
   i) Peningkatan pelayanan kemetrologian.
   j) Pengawasan dan penerapan aplikasi SIUP dan TDP.
   k) Fasilitasi operasi pasar / pasar murah bahan kebutuhan pokok masyarakat.
2. Peningkatan Daya Saing Perdagangan Daerah.
   a) Sosialisasikan dan pembinaan SNI.
   b) Bimbingan teknis perdagangan.
   c) Fasilitasi kemudahan perijinan pengembagan usaha.
   d) Fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah dan promosi dagang dalam negeri / luar negeri.
   e) Pengembangan informasi peluang pasar produk unggulan daerah.
   f) Partisipasi dalam rangka pameran dagang keluar daerah / luar negeri.

c. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan serta Pemberdayaan UMKM-Koperasi terdiri dari :

1. Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
   a) Pemberdayaan potensi ekonomi pedesaan.
   b) Pengembangan system pendukung usaha ekonomi kerakyatan.
   c) Penyaluran kredit usaha rakyat secara bergulir pada UMKM dan Koperasi.
   d) Fasilitasi pembiayaan UMKM dan Koperasi pada perbankan dan lembaga pembiayaan
   e) Sosialisasi program bantuan pemerintah untuk UMKM dan Koperasi.
2. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif bagi UMKM :
   a) Penyusunan kebijakan tentang UMKM.
   b) Perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM.

c) Sosialisasi kebijakan tentang UMKM.
d) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang UMKM
e) Peningkatan dukungan usaha (permodalan dan peralatan) bagi UMKM potensial.

3. Pengembangan Kewirausahaan bagi UMKM dan Koperasi :
   a) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.
   b) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD.
   c) Peningkatan system informasi perencanaan pengembangan UMKM dan Operasi
   d) Peningkatan jaringan usaha UMKM dan Koperasi.
   e) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM dan Koperasi.
   f) Fasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM.
   g) Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi UMKM.
   h) Fasilitasi kegiatan promosi usaha bagi UMKM.
4. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM :
   a) Peningkatan koordinasi antara lembaga.
   b) Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM.
   c) Penyelenggaraan promosi produk UMKM.

Faktor-faktor yang menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 berikut ini :

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendukung Pendorong Pelayanan SKPD Tehadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021				
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan SKPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
Misi 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
1.	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar	- Lahan/Lokasi yang tersedia	- SDM	- Kebijakan pusat
2.	Pembangunan UPT Metrologi Legal	- Regulasi - Dana yang tersedia - SDM yang belum tersedia	- Anggaran SKPD	- Pelimpahan urusan metrologi - Misi KDH dan Wakil Terpilih
3.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	- Perilaku pelaku usaha - Kesadaran konsumen	- Anggaran - Mental pelaku usaha dan konsumen	- Misi KDH dan Wakil
4.	Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	- Akses distribusi barang dan jasa - Kualitas produk	- Anggaran - SDM - Ketaatan pada peraturan anggaran - Daya saing	- Misi KDH dan Wakil
5.	Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	- Komoditas ekspor - Pelabuhan ekspor - Minat investor	- Produk ekspor - Anggaran - SDM	- Misi KDH dan Wakil
6.	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	- Kualitas SDM IKM - Informasi teknologi	- Anggaran - SDM	- Misi KDH dan Wakil
7.	Penataan Struktur Industri	- Sarana industri - Kawasan industri - Regulasi	- Lokasi - Anggaran	- Misi KDH dan Wakil
8.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	- Anggaran - SDM IKM	- Anggaran - SDM IKM	- Misi KDH dan Wakil
9.	Peningkatan Kapasistas IPTEK sistem produksi	- Anggaran - SDM IKM	- Anggaran - SDM IKM	- Misi KDH dan Wakil
10.	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	- Regulasi - Lokasi Sentra - Sarana Prasarana IKM	- Anggaran - SDM IKM	- Misi KDH dan Wakil
11.	Pencapaian iklim usaha yang kondusif pada UMKM	- Akses permodalan - Sosialisasi UMKM	- Jaminan pembiayaan	- Misi KDH dan Wakil
12.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pada UMKM	- Kemitraan rendah - Manajemen rendah - Kualitas UMKM	- Kesadaran dan Kualitas UMKM - Anggaran	- Misi KDH dan Wakil
13.	Pengembangan sistem pendukung usaha pada UMKM	- SDM KUKM - Pemasaran lemah	- Anggaran - Kualitas produk	- Animo masyarakat tinggi - Kebijakan pusat dan Misi KDH dan Wakil
14.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	- Kualitas koperasi - Pengawasan lemah - Sosialisasi kurang	- SDM Koperasi - Anggaran - Pembinaan terbatas	- Animo masyarakat tinggi - Kebijakan pusat dan Misi KDH dan Wakil

Misi 6. Menata dan mengembangkan manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih				
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	- Sumber Daya Aparatur	- Sikap dan mental aparatur, sarana dan prasarana kantor masih kurang	- Pembinaan reward dan Misi KDH dan Wakil
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Sarana dan Prasarana Perkantoran		
3.	Peningkatan disiplin aparatur	- Anggaran		
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	- Sumber Daya Aparatur		
5.	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Sumber Daya Aparatur		

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

3.3 Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Tabel 3.3.1.1
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya Bidang Industri

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perindustrian	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I.	**Perspektif Pemangku Kepentingan**			
1.	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional (PDB)	Masih sedikitnya jumlah unit usaha industri sedang dan besar di Kab. Sintang	Pertumbuhan industi sedang dan besar yang masih rendah	Dukungan politik Pemerintah Daerah
2.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	Belum adanya kesadaran pelaku usaha	Belum adanya master plan kawasan industri	Adanya perencanaan kawasan industri dan Repida
3.	Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	Belum adanya kesadaran pelaku IKM	Pelaku IKM belum ada inovasi terhadap produk	Adanya diklat tentang inovasi produk
4.	Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Kurangnya instruktur dan penyuluh ahli tentang inovasi dan teknologi	Kurangnya kemampuan permodalan untuk mendukung inovasi dan penguasaan teknologi	Adanya bantuan peralatan industri dan adanya anggaran untuk bimtek penyuluh/ mendatangkan instruktur ahli
5.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Sektor industri di Kab. Sintang masih sebatas Industri Kecil Menengah	Terbatasnya jumlah industri sedang dan besar yang dapat menyerap tenaga kerja	Mengkaji kelayakan didirikannya Kawasan Industri di Sungai Ringin Sintang

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perindustrian	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
II.	**Perspektif Proses Internal**			
1.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional	Infrastruktur Kab. Sintang belum mendukung berdirinya Industri Sedang dan Besar	Terbatasnya infrastruktur jalan dan listrik	Adanya perencanaan kawasan industri dan Repida
2.	Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional	Belum adanya aplikasi informasi data industri yang valid	Terbatasnya anggaran untuk pendataan	Adanya kemauan untuk membuat aplikasi informasi data industri

Sumber: Kementerian Perindustrian dan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 3.3.1.2
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya Bidang Perdagangan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I.	**Program Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Perdagangan Luar Negeri yang Berkelanjutan**			
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang bernilai tambah dan jasa	Belum dilakukannya Sosialisasi tentang ketentuan Peraturan Perdagangan Luar Negeri	Jumlah SDM yang minim	Pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen
2.	Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional	Belum Maksimalnya dilakukan Pemantauan dan Monitoring serta Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Kapasitas SDM yg terbatas	Perlu dilakukannya sosialisasi
3.	Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor	Belum maksimalnya dilakukan bimbingan teknis terkait produk-produk yang dihasilkan	Belum dilakukan secara maksimal pameran dagang	Mengikuti berbagai event promosi baik ditingkat nasional maupun internasional
4.	Menurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif)	Belum mendukung sepenuhnya Deregulasi kebijakan tata niaga perdagangan	Belum tersedianya alokasi dana	Perlu dilakukannya sosialisasi tentang sarana dan prasarana distribusi dikalangan dunia usaha
5.	Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (Nation Branding)	Perlu dilakukannya Bimbingan Teknis terkait Diversifikasi produk unggulan daerah	Terbatasya Alokasi Anggaran	Perlu dilakukannya pameran promosi di berbagai event

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
6.	Optimalnya Kinerja Kelembagaan Ekspor	Belum terbentuknya Asosiasi importir yang ada di daerah	Rendahnya SDM bagi pelaku usaha	Perlu dilakukan pembentukan asosiasi di bidang ekspor impor
7.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor	Belum terdatanya pelaku usaha dan asosiasi importir	Belum tersedianya alokasi dana	Perlu dilakukannya pendataan dan verifikasi pelaku usaha
8.	Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan Luar Negeri di Perbatasan	Belum tersedianya ketentuan dan Peraturan Daerah tentang Perdagangan Lintas Batas	Belum terbentuknya asosiasi pedagang perbatasan	Perlu dilakukannya pendataan pedagang/pelaku usaha yang berada di perbatasan
9.	Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang Perdagangan Luar Negeri	Perlu dilakukan sosialisasi tentang ketentuan dan peraturan terkait tata niaga perdagangan	Belum tersedianya alokasi dana	Perlu dilakukannya pendataan dan informasi tentang regulasi perdagangan luar negeri
II.	**Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri yang Bertumbuh dan Berkualitas**			
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan	Kurangnya SDM dalam meningkatkan perdagangan di luar negeri	Terbatasnya SDM	Perlu diikutsertakan berbagai diklat dibidang perdagangan
2.	Meningkatnya Konektivitas Distribusi dan Logistik Nasional	Belum tersedianya sarana dan prasarana gudang untuk menunjang ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok.	Belum tersedianya alokasi dana	Perlu dilakukan diklat teknis tentang kebijakan perdagangan
3.	Meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga Nasional terhadap Produk Dalam Negeri dan/atau Menurunya Impor Barang Konsumsi	Belum maksimalnya ketersediaan produk-produk yang di produksi sehingga permintaan belum terpenuhi	Lemahnya daya beli masyarakat berkenaan produk luar	Perlu ditingkatkannya kualitas produk dalam negeri
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang	Belum dilakukannya sosialisasi tentang ketentuan peraturan yang mengatur perdagangan berjangka komoditi	Belum adanya peraturan pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG dan Pasar Lelang	Direncanakan pembangunan pasar berjangka komoditi, SRG dan Pasar lelang
5.	Memperkecil Kesenjangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Daerah	Belum maksimalnya dilakukan sinkronisasi berkenaan ketersediaan berbagai komoditi dan kebutuhan pokok di daerah	Belum tersedianya alokasi dana yang memadai	Sudah dilaksanakan kegiatan operasi pasar dan pasar murah
6.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Belum maksimalnya pemantauan dan monitoring serta pengawasan arus distribusi barang	Terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok	Sudah dilaksanakan kegiatan operasi pasar dan pasar murah

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standarisasi Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa	Belum pernah dilakukan sosialisasi tentang ketentuan dan peraturan UTTP dan perlindungan konsumen	Belum adanya SDM PPBJ-PK dan SDM Kemetrologian	Perlu diikutsertakan berbagai diklat teknis dibidang kemetrologian dan pengawasan barang dan jasa serta
8.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Belum maksimalnya perlindungan konsumen	Terbatasnya Anggaran	Sudah dilaksanakan pengawasan penggunaan alat UTTP peredaran barang dan jasa
III.	**Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**			
1.	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Belum tersedianya sarana distribusi perdagangan yang representatif	Terbatasanya Anggaran Pembangunan dan Revitalisasi	Tersedianya DAK dan DAU
2.	Penyediaan Fasilitas Pendukung Sarana Distribusi Perdagangan	Belum tersedianya fasilitas pendukung sarana distribusi perdagangan	Terbatasnya Anggaran	Tersedianya DAU
3.	Pelaksanaan Kaji Terap Perda tentang Pengelolaan Pasar	Belum adanya Perda tentang Pengelolaan Pasar	Terbatasnya Anggaran	Tersedianya payung hukum (Perda) tentang Pasar
4.	Penyediaan Kajian Akademik Draft Raperda Pengelolaan Pasar	Belum tersedianya Kajian Akademik Draft Raperda pengelolaan pasar	Jumlah SDM yang minim	Adanya kajian mendalam terhadap Raperda
5.	Penyediaan Kajian Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Pasar	Belum tersedianya Kajian Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Pasar	Jumlah SDM yang minim	Adanya kajian perencanaan pembangunan yang baik
6.	Peningkatan Pembinaan Pengguna Fasilitas Pasar Pemerintah	Rendahnya pemahaman pengguna fasilitas pasar akan pengelolaan yang baik	Terbatasnya Anggaran dan SDM	Adanya kesadaran penggunaan fasilitas pasar
7.	Pelaksanaan Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi	Belum dilakukannya survey rencana pembangunan dan revitalisasi	Terbatasnya Anggaran	Adanya Perencanaan yang matang terhadap pembangunan/ revitalisasi
8.	Penetapan Kawasan Sentra PKL	Belum adanya kawasan sentra PKL	Terbatasnya Anggaran	Iklim usaha yang kondusif
9.	Penyusunan Perbup tentang Pembentukan UPTD Pasar dan Pengelolaannya	Belum adanya Perbup tentang Pembentukan UPTD Pasar dan Pengelolaannya	Jumlah SDM yang minim	Adanya payung hukum pengelolaan pasar
10.	Peningkatan Kualitas Data PKL dan Asongan, Penataan dan Fasilitasi	Belum tersedianya data PKL dan Asongan, Penataan dan Fasilitasi yang baik	Terbatasnya Anggaran dan SDM	Pengelolaan PKL dan Asongan berbasis data

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
11.	Pelaksanaan Penyuluhan PKL dan Asongan	Rendahnya pemahaman PKL dan Asongan terhadap Perda tentang Pasar	Jumlah SDM yang minim	Adanya kesadaran pemahaman PKL dan Asongan terhadap Perda

Sumber: Kementerian Perdagangan RI dan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 3.3.1.3
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya Bidang Koperasi dan UMKM

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I.	**Meningkatnya kontribusi UMKM dan Koperasi dalam perekonomian**			
1.	Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata – rata/tahun)	Lemahnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM	Rendahnya kelembagaan dan usaha KUMKM	Adanya animo masyarakat dalam menjadikan Koperasi sebagai lembaga usaha
2.	Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)	Penyerapan tenaga kerja koperasi dan UMKM terbatas karena usaha yang dikelola bukan padat karya.	Penyerapan tenaga kerja KUMKM masih rendah karena usahanya masih terbatas	Masih adanya penyerapan tenaga kerja koperasi
3.	Pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun)	Belum adanya KUMKM yang mengelola produk – produk ekspor non migas	Produksi KUMKM masih terbatas pada non migas	Adanya kompetensi inti dalam produk unggulan KUMKM
4.	Pertumbuhan kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)	Kecilnya KUMKM yang mengalokasikan dana untuk investasi	Masih rendahnya investasi yang dikelola	Adanya peluang KUMKM untuk mengelola investasi
II.	**Meningkatnya daya saing UMKM**			
1.	Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata – rata/tahun)	Masih rendahnya pertumbuhan produktivitas UMKM	Rendahnya kemampuan finansial KUMKM	Adanya program peningkatan sarana produksi
2.	Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)	Masih kurangnya akses pembiayan pada lembaga keuangan (bank dan non bank)	Lemahnya kuantitas permodalan koperasi dan UMKM	Adanya program pembiayaan dari Pemerintah
3.	Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun)	Masih rendahnya KUMKM yang menerapkan standarisasi dan sertifikasi produk	Standarisasi dan sertifikasi produk belum dilaksanakan	Adanya kemauan UMKM untuk menerapkan standarisasi dan sertifikasi produk

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
III.	**Meningkatnya usaha baru**			
1.	Pertambahan jumlah wirausaha baru – melalui program pusat dan daerah (kumulatif selama 5 tahun)	Rendahnya jiwa kewirausahaan KUMKM	Pengelolaan usaha KUMKM masih sederhana	Adanya kemauan KUMKM untuk melakukan usaha
IV.	**Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi**			
1.	Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)	Masih rendahnya partisipasi anggota	Masih rendahnya pendapatan anggota koperasi	Adanya pemahaman kewajiban anggota Koperasi
2.	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata – rata/tahun)	Masih kurangnya kualitas anggota	Kurangnya pemahaman anggota Koperasi	Adanya minat masyarakat untuk membentuk koperasi
3.	Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata – rata/tahun)	Masih kecilnya diversifikasi usaha	Masih kecilnya usaha yang dikelola	Banyaknya peluang usaha yang bisa dikelola

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM dan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

3.3.2 Telahaan Renstra Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 3.3.2.1
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya Bidang Industri

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I.	**Pengembangan Sektor Industri**			
1.	Meningkatkan pelatihan tenaga instruktur bagi penyuluh Perindustrian	Terbatasnya instruktur dan tenaga penyuluh	Masih menggunakan tenaga instruktur dari luar	Diklat instruktur bagi penyuluh Perindustrian
2.	Meningkatkan Pembinaan langsung ke lapangan	Terbatasnya prasarana untuk mencapai daerah yang terpencil dengan medan yg berat	Untuk daerah tertentu hanya bisa dikunjungi saat musim kemarau	Penyediaan kendaraan yang memadai
3.	Memfasilitasi bantuan peralatan	Lemahnya kemampuan IKM membuat proposal	Keterbatasan dana APBD untuk pengadaan peralatan bagi IKM yg membutuhkan	Kurangnya bantuan peralatan dari APBD

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
II.	**Pengembangan Sistem Pendukung Sektor Industri**			
1.	Penyelenggaraan promosi IKM pada event-event promosi	Hasil kerajinan yang dipamerkan lebih diminati masyarakat dari luar pulau Kalimantan dan luar negeri	Masih sedikitnya jumlah pameran di luar Kalimantan	Berpartisipasi pada pameran tingkat nasional maupun Internasional
2.	Latihan pengembangan SDM bagi pelaku IKM	Belum adanya tenaga instruktur Disperindag	Kegiatan pelatihan masih dilakukan di luar Sintang	Perlunya diklat bagi penyuluh
3.	Penyelenggaraan pembinaan IKM	Terbatasanya pengetahuan pelaku IKM mengenai pentingnya inovasi bagi produk IKM	Pelaku IKM belum adanya inovasi terhadap produk	Adanya diklat tentang inovasi produk
4.	Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk-produk IKM	Galeri yang hanya kurang memadai	Terbatasnya jumlah produk IKM yg ditampung di galeri	Ditambahkan modal awal untuk membeli produk dari pelaku IKM
III.	**Pengembangan Kualitas Produk Industri**			
1.	Sosialisasi PIRT, sertifikasi halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Kemampuan pemerintah melaksanakan sosialisasi secara berkesenambungan masih kurang	Rendahnya kesadaran pelaku IKM akan pentingnya sosialisasi	Diadakan sidak IKM makanan yg belum memiliki izin
2.	Hilirisasi produk dengan bahan baku komoditi unggulan Kab. Sintang	Terbatasnya kemampuan petugas mengenai hilirisasi produk	Program hilirisasi yang masih baru di Kab. Sintang	Diadakan diklat bagi petugas yang menangani hilirisasi produk
3.	Diversifikasi produk lama ke produk baru	Pelaku IKM enggan memproduksi produk baru	Kurangnya pelatihan dan diklat mengenai diversifikasi produk	Membari diklat diversifikasi produk bagi pelaku IKM unggulan
IV.	**Program Penataan Struktur Industri**			
1.	Kompetisi GKM IKM	Kesulitan dalam menjaring IKM yang layak mengikuti lomba GKM	Peserta GKM kurang bersemangat mengikuti lomba	Menyediakan reward bagi Gugus yang menang
2.	Pengawasan dan pengujian mutu bahan baku industri dan perdagangan di kab. Sintang	Lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pengujian bahan baku industri khususnya DAMIU dan AMDK	Masih terdapatnya DAMIU yang belum berizin	Dilakukan sidak pada pelaku IKM

Sumber: Disperindag Provinsi Kalimantan Barat dan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 3.3.2.2
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Bidang Perdagangan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disperindag Provinsi Kalimantan Barat	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I.	**Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri yang di Dukung dengan Pengamanan Perdagangan Daerah**			
1.	Laju Inflasi Kab.Sintang pada Tahun 2014 menyentuh 6,85 %, lebih rendah dibandingkan inflasi di Kalbar (C.Q. Kota Pontianak) yang mencapai 9,48% dan juga dengan inflasi nasional yang mencapai 8,36%	Menurunnya daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pokok	Rendahnya pendapatan masyarakat akibat menurunnya harga hasil komoditi	Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Melaksanakan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah
2.	Sistem Resi gudang sebagai bagian dari pengembangan sistem logistik baru	Belum tersedianya sarana dan prasarana gudang	Rendahnya SDM tentang pengelolaan Resi Gudang terkait Distribusi	Perlunya dilakukan Bimbingan Teknis serta Studi Banding tentang Distribusi
3.	Perlu perhatian serius untuk pembentukan dan operasional BPSK di Kab.Sintang	Tidak Tersedianya Dana Pembentukan Anggota BPSK	Belum Terlaksanannya Pemilihan Anggota BPSK	Tim Seleksi Pemilihan Anggota BPSK sudah terbentuk
4.	UU Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan Pemerintah Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan Metrologi legal	Tidak tersediannya Anggaran untuk pembangunan Sarana dan Prasarana serta SDM Metrologi Legal	Belum tersediannya Sarana dan Prasarana, serta SDM Metrologi legal	Kelembagaan Metrologi di Kab.Sintang sudah terbentuk pada Th.2015

Sumber: Disperindag Provinsi Kalimantan Barat dan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 3.3.2.3
Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya Bidang Koperasi dan UMKM

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten / Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing.	Belum mampu meningkatkan sistem pengelolaan kelembagaan usaha dengan mengedepankan Iptek	Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengadakan pelatihan serta fasilitas yang tersedia kurang memadai	Kemandirian lembaga usaha dalam meningkatkan pelayanan yang berbasis Iptek
2	Meningkatnya omzet KUMKM	Mendorong penyerapan modal usaha KUMKM	Kurangnya fasilitasi pemerintah dalam mengoptimalkan peran perbankan dan lembaga keuangan non bank untuk mendukung modal usaha KUMKM	Aktifnya KUMKM mencari peluang dalam menguatkan kemampuan usahanya serta semakin meningkatnya manajemen lembaga

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat dan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya iklim usaha perdagangan dan industri yang kondusif dalam mematuhi ketentuan hukum perdagangan.
b. Meningkatnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk memanfaatkan tera ulang alat ukur
c. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan peredaran makanan, minuman dan produk yang berbahaya
d. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
e. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi

Program prioritas SKPD dan target kinerja serta lokasi program prioritas adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan mutu pengolahan hasil perkebunan karet khususnya, dengan target kinerja terlaksananya pelatihan pengolahan mutu karet yang di tujukan pada petani karet di 14 kecamatan
b. Peningkatan mutu pengolahan makanan dan obet herbal, dengan target kinerja terlaksananya bimbingan teknis pengolahan makanan dan obat herbal yang ditujukan pada industri kecil menengah dan kelompok tani obat di 14 kecamatan

c. Peningkatan pengawasan peredaran makanan, minuman dan produk berbahaya, dengan target kinerja terlaksananya pengawasan dan pengujian sampel pada 14 kecamatan
d. Peningkatan kesadaran masyarakat pelaku usaha dan petani akan mutu Bahan Olah Komoditi Eksport (Bokor) SIR, dengan target kinerja meningkatnya pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Perdagangan Bokar SIR (STPP-Bokor SIR) pada 14 Kecamatan
e. Terlaksananya sosialisasi pembinaan SNI, dengan target kinerja sosialisasi SNI pada 14 Kecamatan.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang, dan RTRW yang berhubungan dengan Tugas Pokok fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Sintang terdapat Rencana Struktur ruang wilayah Kabupaten Sintang sebagai pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten berada di Sungai Ringin sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) industri terletak di Kecamatan Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian. Sistem jaringan transportasi darat sebagai strategi penunjang peningkatan pengembangan industri yang mencakup aneka industri kecil dan besar untuk mengolah bahan baku dari hasil pertanian.

Kawasan budidaya salah satunya adalah kawasan peruntukan industri yang terdiri dari kawasan peruntukan industri besar, sedang dan rumah tangga. Kawasan peruntukan industri besar antara lain industri pengolahan karet, industri pengolahan tandan buah segar (TBS), industri *crumb rubber*, industri *crude palm oil* (CPO), industri kernel (inti sawit). Kawasan peruntukan industri sedang meliputi Kawasan Industri Sungai Ringin di kecamatan Sintang, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sungai Tebelian. Sedangkan kawasan peruntukan industri rumah tangga antara lain IKM pangan di 14 kecamatan, IKM sandang di Sintang, Dedai, dan Kelam Permai, IKM kimia dan bahan bangunan di Kec. Sintang, IKM logam dan elektronika di Kec Sintang, Serawai, Ambalau, Tempunak, Dedai, Kelam Permai, IKM kerajinan di Kec Sintang, Kelam Permai, Tempunak, Kayan Hulu, Sepauk, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu. Sedangkan pengembangan industri berciri khusus untuk komoditi tenun ikat dan rotan serta industri komoditi lainnya yang menjadi ciri khusus Kabupaten Sintang.

Ketentuan umum peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya salah satunya adalah kawasan industri. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan meliputi peningkatan nilai tambah perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan baik tangkap maupun budidaya. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan

industri meliputi pemanfaat ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; industri tidak diperkenankan mengkonversi lahan pertanian dengan irigasi teknis; kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri didorong untuk dibentuk badan pengelola dan badan pengelola secara profesional menyiapkan lahan dan sarana pendukung untuk suatu kegiatan industri. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata meliputi pelarangan pembangunan pemukiman dan industri yang tidak berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Ketentuan umum untuk peraturan zonasi untuk kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Tahun 2012)

Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan suatu kerangka kerja (*framework*) pada tahap dini perencanaan pembangunan khususnya terhadap Renstra Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang dengan maksud agar di masa mendatang dapat dicapai harmoni antara pembangunan industri, ekonomi perdagangan, koperasi dengan lingkungan hidup.

Ada tiga isu dalam hal ekonomi dan kelembagaan, yaitu:

1. Banjir dan erosi, adanya perubahan terhadap struktur ruang dan pola ruang akan dapat mendorong percepatan terbukanya tutupan lahan di hulu dan di sekitar DAS Kapuas yang ada di Kabupaten Sintang. Kondisi ini menurunkan kemampuan lahan untuk menahan *run off* sehingga menimbulkan debit permukaan yang sangat besar dan tidak tertampung pada DAS Kapuas yang ada di Kabupaten Sintang, sehingga terjadi banjir dan erosi di tempat yang lebih rendah atau di daerah hilir.
2. Konversi lahan, perubahan terhadap stuktur dan pola ruang mendorong perubahan kebijakan pembangunan infrastruktur baik untuk peningkatan ekonomi wilayah maupun pemukiman. Kondisi ini akan menimbulkan berbagai dampak terutama terhadap degradasi dan deforestasi, dan hal ini dapat terjadi di setiap lokus dengan aksesibilitas yang tinggi sebagai akibat perwujudan struktr ruang maupun pola ruang.
3. Kekeringan dan kebakaran hutan, perubahan lahan sebagai akibat perubahan pola ruang dapat menyebabkan pembukaan lahan yang signifikan, dan ditambah dengan adanya perubahan iklim secara global, mengakibatkan peningkatan terhadap kekeringan dan

kebakaran lahan. Hal ini dapat terjadi di semua bagian yang rawan kebakaran. Seperti wilayah tanah gambut atau bergambut.

4. *Illegal trading*, adanya aktivitas perubahan struktur ruang seperti perwujudan PKL, PKSN, PKW, jalan, pelabuhan, terminal dan bandara dan perwujudan pola ruang akan mendorong terjadinya peningkatan kegiatan perdagangan ilegal terutama Negara tetangga yang mempunyai akses langsung melalui jalur darat. Hal ini dapat terjadi si seluruh kota dan bahkan desa.
5. Tumpang tindih perijinan, adanya perubahan pola ruang mendorong penentuan rencana sektoral menjadi berubah, dan bilamana tidak terjadi koordinasi maka akan terjadi tumpang tindih perijinan. Hal ini dapat terjadi di seluruh fokus perubahan pola ruang dari kawasan ke APL.
6. Tergesernya pasar-pasar tradisional, adanya aktivitas perubahan struktur ruang seperti perwujudan PKL, PKSN, PKW, jalan, terminal dan bandara dan perwujudan pola ruang akan mendorong terjadinya peningkatan kegiatan perdagangan berskala besar sehingga akan menggeser sistem pasar tradisional.
7. Konflik sosial, adanya aktivitas perubahan struktur ruang seperti perwujudan PKL, PKSN, PKW, jalan, terminal dan bandara, dan perwujudan pola ruang akan mendorong terjadinya penambahan dan perubahan nilai-nilai sosial sehingga bilamana masyarakat belum siap dapat memicu terjadnya konflik sosial.
8. Pergeseran nilai-nilai budaya lokal/kearifan lokal/peran lebaga adat, adanya keinginan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk merevisi RTRWK Sintang baik pada struktur ruang maupun pola ruang membuka akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk beraktivitas. Dengan adanya pembukaan akses ini, maka akan terjadi pemasukan nilai-nilai baru di kawasan ini, arus masuk nila-nilai baru tersebut menjadi tidak terbendung dan ada yang berimplikasi negatif sehingga menggeser kearifan lokal yang ada.
9. *Human Trafiicking*, adanya aktivitas perubahan struktur ruang seperti perwujudan PKL, PKSN, PKW, jalan, terminal dan bandara akan meningkatkan perdagangan manusia ke luar negeri.
10. Ekonomi dan kelembagaan, berkembangnya peradaban manusia dan lingkungannya menyangkut berbagai bidang yang harus ditangani dengan baik, seperti perdagangan ilegal dan ijin/proses perijinan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bertitik tolak pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, permasalahan pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Sintang meliputi:

1. Kecenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi dari 6,47% tahun 2013 menjadi hanya 5,36% tahun 2014.
2. Terlalu dominannya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang lebih dari 25% PDRB dan kecenderungan penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dari 10,62% tahun 2010 menjadi hanya 10,03% tahun 2014 serta stagnan-nya kontribusi sektor perdagangan di sekitar angka 17,5%.
3. Tingginya ketimpangan pendapatan penduduk yang ditunjukkan oleh tingginya angka Indeks Gini yang sudah melebihi 0,4 pada tahun 2013.
4. Sebagian besar investasi berada pada sektor primer yang bernilai tambah rendah disebabkan oleh kesulitan investor mengembangkan sektor industri pengolahan sebagai akibat minimnya ketersediaan infrastruktur.
5. Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif, yaitu sekitar 33% dari total 337 jumlah koperasi.
6. Sulitnya akses Koperasi dan UMKM terhadap modal, dimana data Bank Indonesia Triwulan I tahun 2014 menunjukkan bahwa dari Rp.16.149 triliun jumlah kredit produktif di Kalimantan Barat ternyata hanya sekitar Rp.1,25 triliun atau sekitar 7,74% yang terdistribusi di Kabupaten Sintang yang sebagian besar juga tidak dinikmati oleh koperasi dan UMKM.
7. Masih rendahnya daya saing daerah yang antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya pengeluaran penduduk untuk makanan dibandingkan non makanan serta kecenderungan menurunnya Nilai Tukar Premi.

   Dari analisis gambaran permasalahan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, analisis renstra Kementerian terkait dan renstra Disperindagkop dan UMKM Provinsi serta hasil analisis kajian lingkungan hidup strategis dan telaahan rencana tata ruang wilayah, maka kondisi atau hal-hal yang telah dikemukakan di atas, apabila keadaan tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal dapat dijabarkan ke dalam Isu Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016
3. Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa Belum optimal

4. Penyerahan Pelimpahan Kewenangan Kemetrologian Provinsi ke Daerah Kab/Kota.
5. Kreativitas Pelaku Usaha dan Kualitas Produk yang masih rendah.
6. Hilirnisasi industri
7. Sarana dan Prasarana Penunjang industri belum memadai (Jalan, Listrik dan Air)
8. Masih adanya peredaran barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuann yang berlaku.
9. Rendahnya kualitas SDM Koperasi
10. Rendahnya akses permodalan Koperasi dan UMKM.
11. Rendahnya dan lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi
12. Masih besarnya Jumlah Koperasi Tidak Aktif

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang

4.1.1 Visi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan kegiatan guna meningkatkan kinerjanya tetap berpedoman pada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Sintang Tahun 2016-2021 2021 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021" dan Misi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 khususnya pada point (4) "Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah dan point (5) "Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas dapat terarah dan merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan Subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah maka perlu visi dan misi Dinas sebagai dasar untuk pengukuran kinerja maka Visi, dan Misi dirumuskan sebagai berikut :

"MENJADIKAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH MAJU DAN MANDIRI "

Nilai-nilai yang terkandung dalam pernyataan Visi adalah :

a. Maju yang berarti adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pedesaaan dengan bertumpu pada kompentensi inti di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
b. Mandiri yang berarti adanya perubahan sikap dan mental masyarakat untuk berusaha dari diri sendiri sehingga menciptakan jiwa kewirausahaan (enterpreneur) dan akan menimbulkan daya saing masyarakat Sintang dalam mengembangkan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi tangguh dalam menghadapi persaingan global.
c. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu peningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur Sintang yang ditunjang tata kelola yang baik.

4.1.2 Misi

Misi adalah suatu tugas yang dilaksanakan oleh aparatur sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya tugas pokok dan fungsinya dengan rencana dan strategi yang tertuang dalam program kerja organisasi. Misi yang dibuat harus jelas dan terukur yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah, serta peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan dan mencapai Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, maka Misi yang di laksanakan sebagai berikut :

1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.
2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.
4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.
5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

Keterkaitan Visi dan Misi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang tergambar dalam Tabel 4.1.2.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang

Visi Kabupaten Sintang 2016-2021	Visi Disperindagkop UKM Kab.Sintang
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Relegius dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.	Menjadikan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang maju dan Mandiri.
Misi Kabupaten Sintang 2016-2021	Misi Diperindagkop UKM Kab.Sintang
1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal. 2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat. 3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.	1. Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi. 2. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
Misi Kabupaten Sintang 2016-2021	Misi Diperindagkop UKM Kab.Sintang
4. Meningkatkan pemahamaman, pengha yatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.	3. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global. 4. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.

5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbassis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5. Mewujudkan Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang profesional dan Kreatif.

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

C. Keterkaitan Visi dan Misi

Visi

Meningkatkan Pertumbuhan eko nomi masyarakat berbasis pedesa an dengan bertumpu pada kompentensi inti di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kemandirian masyarakat untuk menciptakan jiwa kewirausahaan (enterpreneur) dan akan menim bulkan daya saing masyarakat Sintang dalam mengembangkan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi tangguh dalam menghadapi persaingan global.

- ✓ Meningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Misi

1. Hilirisasi Industri
2. Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa
3. Meningkatkan Pendidikan, Pela tihan, Bimbingan Teknis
4. Penguatan Lembaga dan Usaha Koperasi dan UMKM
5. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
6. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana
7. Meningkatkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan masyarakat, Koperasi dan UMKM
8. Meningkatkan mutu dan diver sifikasi Produk dan Pemasaran
9. Meningkatkan akses dan sumber permodalan bagi Koperasi/ UMKM /IKM
10. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian
11. Meningkatkan perlindungan masyarakat
13. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
14. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Sintang

4.2.1 Tujuan

Tujuan organisasi harus konsisten dan sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, yang menggambarkan arah strategi. Tujuan organisasi adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan.

Berdasarkan analisa SWOT diperoleh asumsi untuk menfokuskan arah program dan aktifitas dalam melaksanakan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah:

1. Meningkatkan manajemen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
2. Meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
3. Meningkatkan pelayanan prima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang kepada masyarakat.
4. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha, Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
7. Meningkatkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan industri/LKM, Perdagangan/Pasar, Koperasi dan UKM.
8. Meningkatkan kesejahteraan disiplin dan profesionalisme aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

4.2.2 Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan, maka sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah.
2. Terlaksananya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM.
3. Tercapainya kualitas kelembagaan koperasi.

4. Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan.
5. Terwujudnya Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
6. Terwujudnya Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
7. Terwujudnya pengembangan IKM.
8. Terwujudnya peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi.
9. Terwujudnya peningkatan kemampuan teknologi industri.
10. Terwujudnya kegiatan penyuluhan perindustrian dan perdagangan.
11. Terwujudnya administrasi perkantoran.
12. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
13. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur.
14. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
15. Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menenngah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang disajikan pada Tabel 4.2.2.1 berikut ini :

Tabel 4.2.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang
Bidang Industri

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha lateks	Pelaku usaha lateks karet pekat	Terlatihnya pelaku usaha lateks karet pekat	25 orang	30 orang	35 orang	40 orang	45 orang
2	Meningkatnya pengetahuan dan SDM pelaku usaha bata merah	Pelaku usaha bata merah	Tercapainya kemampuan pengrajin dalam mengolah bata merah	15 orang	20 orang	25 orang	30 orang	40 orang
3	Meningkatnya pengetahuan pengrajin tenun ikat	Pengrajin tenun ikat	Terlatihnya pengrajin tenun ikat	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
4	Meningkatnya kemampuan pelaku usaha pengolahan makanan dan kerajinan	Pelaku usaha industri kecil makanan dan kerajinan	Terlatihnya pelaku usaha pengolahan makanan dan kerajinan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
5	Meningkatnya kemampuan modifikasi bordir dan fashion	Pelaku IKM fashion/tekstil	Terlatihnya pelaku IKM fashion/tekstil	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
6	Meningkatnya pengetahuan pelau usaha lada	Pelaku usaha lada	Tercapainya kemampuan pengolahan lada oleh pelaku usaha lada	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok
7	Meningkatnya kemampuan pengolahan makanan hasil ikan	Pelaku IKM makanan	Terlatihnya kemampuan pengolahan makanan hasil ikan	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang
8	Meningkatnya kemampuan pengolahan Nata de Coco	Pelaku IKM Nata de Coco	Terlatihnya pelaku IKM Nata de Coco	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
9	Meningkatnya pengetahuan IKM makanan mengenai perizinan	Pelaku IKM makanan	Tercapainya produk IKM berizin	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
10	Meningkatnya kemampuan pengolahan pangan tepat guna	Pelaku IKM makanan	Terlatihnya pelaku IKM makanan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
11	Meningkatnya pengetahuan pengolahan tepung jagung	Pelaku IKM tepung jagung	Terlatihnya pengolahan tepung jagung	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Meningkatnya kemampuan pengolahan rotan	Pelaku usaha pengolahan rotan	Terlatihnya kemampuan pengolahan rotan	25 orang	30 orang	0	40 orang	0
13	Meningkatnya kemampuan pengolahan tepung tapioka/singkong	Pelaku usaha pengolahan tapioka	Tercapainya kemampuan pengolahan tepung tapioka	15 orang	0	25 orang	0	40 orang
14	Meningkatnya kemampuan usaha pandai besi	Pelaku usaha pandai besi	Tercapainya kemampuan pandai besi	10 orang	0	15 orang	20 orang	0
15	Meningkatnya kemampuan pengolahan tahu	Pelaku usaha pengolahan tahu	Tercapainya kemampuan pengolahan tahu	20 orang	20 orang	0	20 orang	20 orang
16	Meningkatnya kemampuan SDM mebel kayu	Pelaku usaha mebel kayu	Terlatihnya pelaku usaha mebel kayu	15 orang	0	15 orang	0	15 orang
17	Meningkatnya pengetahuan pengolahan jagung	Pelaku usaha pengolahan jagung	Terlatihnya pengolahan jagung	10 orang	0	10 orang	15 orang	0
18	Meningkatnya pengetahuan pengolahan cabe	Pelaku usaha pengolahan cabe	Terlatihnya pengolahan cabe	10 orang	10 orang	0	15 orang	0
19	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk tenun ikat	Pengranjin IKM tenun ikat	Tebantunya pengrajin tenun ikat	5 kelompok	0	6 kelompok	0	8 kelompok
20	Meningkatnya kualitas dan kuantitas minyak atsiri	Kelompok IKM minyak atsiri	Terbantunya IKM minyak atsiri	0	5 kelompok	0	5 kelompok	0
21	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tahu	Kelompok pengolahan tahu	Terbantunya kelompok pengolahan tahu	3 kelompok	0	5 kelompok	0	5 kelompok
22	Meningkatnya kualitas dan kuantitas batako press	Kelompok usaha batako press	Terbantunya kelompok pengolahan batako press	0	7 kelompok	0	7 kelompok	0
23	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tepung tapioka	Kelompok pengolahan tapioka	Terbantunya kelompok pengolahan tapioka	6 kelompok	0	6 kelompok	0	0
24	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengolahan kopi bubuk	Kelompok pengolahan kopi bubuk	Terbantunya kelompok pengolaha kopi bubuk	3 kelompok	0	5 kelompok	0	0
25	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengusaha fashion/tekstil	Kelompok usaha fashion/tekstil	Terbantunya kelompok usaha fashion/tekstil	0	5 kelompok	0	7 kelompok	0
26	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelompok pengolahan ikan	Kelompok pengolahan ikan	Terbantunya kelompok pengolahan ikan	4 kelompok	0	6 kelompok	0	0

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelompok pengolahan tebu	Kelompok pengolahan tebu	Terbantunya kelompok pengolahan tebu	5 kelompok	0	5 kelompok	0	5 kelompok
28	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelompok pengolahan jagung	Kelompok pengolahan jagung	Terbantunya kelompok pengolahan jagung	5 kelompok	0	5 kelompok	0	5 kelompok
29	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelompok pandai besi	Kelompok pandai besi	Terbantunya kelompok pandai besi	6 kelompok	0	6 kelompok	0	0
30	Meningkatnya kualitas dan kuantitas mebel kayu	Kelompok mebel kayu	Terbantunya kelompok mebel kayu	5 kelompok	0	5 kelompok	0	0
31	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tepung lada	Kelompok usaha tepung lada	Terbantunya kelompok pengolahan tepung lada	0	6 kelompok	0	6 kelompok	0
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengolahan cabe	Kelompok pengolahan cabe	Terbantunya kelompok pengolahan cabe	2 kelompok	0	2 kelompok	0	0
33	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan IKM unggulan	Kelompok IKM terbaik di Kab. Sintang	Terbentuknya Gugus Kendali Mutu (GKM) Kab. Sintang	1 Gugus	0	1 Gugus	0	1 Gugus
34	Mengumpulkan data industri baru	Pelaku Industri Formal dan Non formal	Terpantaunya pertumbuhan industri di Kab. Sintang	60 IKM	75 IKM	85 IKM	90 IKM	100 IKM
35	Memastikan pelaku usaha AMDK dan DAMIU sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku	Pelaku usaha AMDK dan DAMIU	Terpantaunya perkembangan AMDK dan DAMIU di Kab. Sintang	10 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM
36	Menyelesaikan rencana pembangunan industri daerah	Rencana Pembangunan Industri Daerah (REPIDA)	Terselesaikannya rencana pembangunan industri daerah	1 REPIDA	1 REPIDA	1 REPIDA	1 REPIDA	1 REPIDA
37	Meningkatnya sarana dan prasarana gedung galeri	Gedung galeri	Tercapainya gedung galeri yang memadai	15 Jenis	25 Jenis	30 Jenis	35 Jenis	40 Jenis
38	Memantau, mengendalikan dan mengawas perizinan IUI dan TDI	Perusahaan AMDK, AMIU, Karet dan Sawit	Terpantaunya, terkendalinya dan terawasinya perizinan IUI dan TDI	20 Unit usaha	20 Unit usaha	20 Unit usaha	20 Unit usaha	20 Unit usaha
39	Memonitor dan mengevaluasi usaha industri	Pelaku usaha Industri formal	Termonitornya industri formal di Kab. Sintang	70 IKM	80 IKM	90 IKM	100 IKM	115 IKM
40	Membina dan mengembangkan IKM	Kelompok IKM	Terbinanya kelompok IKM	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Meningkatnya kemampuan pelaku IKM	Pelaku IKM	Terlatihnya kemampuan pelaku IKM	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang
42	Meningkatnya pengetahuan siswa sekolah kejuruan	Siswa sekolah kejuruan	Terlatihnya kemampuan siswa sekolah kejuruan	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
43	Mengkaji sarana maupun prasarana klaster industri	Perda Perindustrian	Tersedianya Perda mengenai Klaster Industri	0	1 Perda	0	0	0
44	Menyediakan sarana dan prasaranan klaster industri	Sarana dan prasarana KIID	Tersedianya sarana dan prasarana Kompetensi Inti Industri Daerah	0	0	1 KIID	0	0
45	Mengkaji penyusunan Road Map Kawasan Industri	Dokumen Roadmap KI	Terbentuknya Road Map Kawasan Industri	0	0	1 dokumen	0	0
46	Membangun Kawasan Industri dan Utilitasnya	Kawasan Industri dan utilitasnya	Terbangunnya Kawasan Industri dan Utilitasnya	0	0	1 KI	1 KI	1 KI
47	Membina pengembangan industri kerajinan rakyat	Pelaku usaha/IKM/perorangan yang kompeten	Terbinanya Industri kerajinan rakyat	2 Piagam Upakarti	2 Piagam Upakarti	2 Piagam Upakarti	2 Piagam Upakarti	2 Piagam Upakarti
48	Mempromosikan Produk IKM	Event promosi	Tersedianya sarana untuk mempromosikan produk IKM	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event
49	Membina IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri	OVOP yang terbentuk	Terbentuknya OVOP	0	1 OVOP	0	0	0
50	Membina IKM secara langsung	Kelompok IKM binaan	Terbinanya IKM	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok
51	Meningkatnya kemampuan kelompok pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan	Kelompok pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan	Terlatihnya kemampuan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan	3 kelompok	1 kelompok	0	0	0
52	Meningkatnya pengetahuan pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang	Pelaku usaha DAMIU	Tercapainya kemampuan pengolahan DAMIU	1 kali	0	1 kali	0	1x
53	Meningkatnya kemampuan pelaku industri kerajinan rumah tangga	Kelompok IKM	Terlatihnya kelompok IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Mengembangkan sistem inovasi teknologi industri	Kelompok IKM	Terlatihnya kemampuan pelaku IKM	0	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok
55	Menyediakan informasi produk unggulan	IKM unggulan	Tersedianya informasi produk unggulan	5 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM
56	Membekali IKM unggulan dengan Teknologi Tepat Guna (TTG)	IKM unggulan	Terlatihnya kemampuan penguasaan teknologi tepat guna pada IKM unggulan	0	5 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM
57	Memfasilitasi peningkatan sistem produksi	IKM unggulan	Tercapainya peningkatan sistem produksi pada IKM unggulan	0	0	5 IKM	5 IKM	5 IKM
58	Menyediakan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Website tentang Disperindagkop dan UKM	Tersedianya sarana informasi yang dapat diakses oleh umum	1 web	0	0	0	0
59	Memelihara jaringan website	Petugas pengelola website	Terpeliharanya website sarana informasi	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
60	Mengadakan perlombaan batik daerah	IKM pembuat batik daerah	Terlaksananya perlombaan batik daerah	0	0	1 Event	1 Event	1 Event

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 4.2.2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang Bidang Perdagangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terwujudnya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha ten tang pentingnya per lindungan konsumen	-	-	-	-	-
2	Pengawasan Penggunaan Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya	Pelaku usaha dan Pengguna Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Pengguna Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	8 Jenis UTTP	8 Jenis UTTP	8 Jenis UTTP	8 Jenis UTTP	8 Jenis UTTP

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Monitoring/Pemantauan Produk AMDK/AMIU dan Pemasarannya	Pelaku Usaha AMDK/AMIU	Terjaminnya Mutu Pro duk Air Minum	10 Sampel	10 Sampel	13 Sampel	14 Sampel	15 Sampel
4	Pemantauan Produk Wajib SNI	Pelaku Usaha	Terjaminnya Produk Berstandar SNI	3 Sampel	3 Sampel	3 Sampel	4 Sampel	5 Sampel
5	Monitoring dan Pemantauan Produk Kadaluasa dan Kelengkapan Label	Produk dalam dan Luar Negeri	Tersedianya identitas Produk yang benar sesuai dengan Pelabelan	30 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha
6	Pengawasan Distribusi Penya luran Pupuk dan BBM Bersubsidi	Pelaku Usaha	Terlaksananya Stabilitas Harga Pupuk dan BBM	3 Distributor 12 SPBU	3 Distributor 12 SPBU	3 Distributor 12 SPBU	3 Distributor 12 SPBU	3 Distributor 12 SPBU
7	Pembentukan BPSK	Pelaku Usaha/ Konsumen	Terlaksananya penyeleaian sengketa konsumen	1 Dok	-	-	-	-
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana BPSK	Tersedianya sarana dan prasarana BPSK	Terlaksananya fasitas kinerja BPSK	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket
9	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	pelaku usaha/konsumen	Tersesainya sengketa konsumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
10	Sosialisasi UU No.8 Tentang Perlindungan Konsumen	Pelaku Usaha/ Konsumen	Meningkatnya Pengetahuan Pelaku Usaha/ Konsumen	14 Kelpk	14 Kelpk	14 Kelpk	14 Kelpk	14 Kelpk
11	Forum Konsumen Cerdas	Pelajar	Terlaksananya forum konsumen cerdas	2 Klpk (40 Pelajar)	2 Klpk (40 Pelajar)	2 Klpk (40 Pelajar)	2 Klpk (40 Pelajar)	2 Klpk (40 Pelajar)
12	Operasi Pasar	Terjangkaunya Harga Sembako	Terlaksananya Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Pasar Murah (Fasilitasi Pasar Murah)	Terjangkaunya Harga Sembako	Terlaksananya Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
14	Monitoring Harga Sembako	Pelaku Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Strategis Lainnya	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali
15	Pembangunan UPT Metrologi Legal	TerwujudngaPembangunan Fasilitas UPT	Terlaksananya Pembangunan Sarana Pelayanan Tera/ tera Ulang	1 Unit	-	-	-	-
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Metrologi Legal	Tersedianya sarana dan prasarana UPT Metrologi Legal	Terlaksananya fasitas kinerja Metrologi Legal	1 Pekat	1 Pekat	1 Pekat	1 Pekat	1 Pekat
17	Sosialisasi UU No.2 Tentang Metrologi Legal	PNS/ Pelaku Usaha	Meningkatkan tertib ukur dan tertib niaga	14 Kelompok	14 Kelompok	14 Kelompok	14 Kelompok	14 Kelompok
18	Pendataan Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya	Pelaku usaha dan Pengguna alat UTTP	Pengguna Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	800 UTTP	880 UTTP	960 UTTP	1.040 UTTP	1.120 UTTP
19	Pembentukan Pasar Tertib Ukur	Pelaku Usaha/ Pengguna UTTP	Terjaminnya Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar
20	Tera/Tera Ulang alat Ukur Takar Timbang	Pelaku Usaha, PT, BUMD, Perusahaan yang memiliki alat UTTP	Terjaminnya Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya	14 Kali	14 Kali	14 Kali	14 Kali	14 Kali
21	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Nasional	Mengikuti event-event pameran nasional	Terlaksananya Promosi Unggulan Produk Daerah	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Penyusunan Prognosa dan pemantauan Stok Sembako	Pelaku Usaha (Agen Sembako)	Tersedianya Data Stok Sembako dan Pola Konsumsi terhadap Kebutuhan Pokok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
23	Pendataan Kemitraan	Lembaga Keuangan dan Toko Modern	Tersedianya Data Kemitraan	210 Pelaku Usaha	225 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	255 Pelaku Usaha	270 Pelaku Usaha
24	Kemitraan (Macth Making) antara Pelaku Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Besar	IKM dan UMKM	Terciptanya Kerjasama antara Pelaku Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha Besar	20 Pelaku Usaha Mikro	25 Pelaku Usaha Mikro	30 Pelaku Usaha Mikro	35 Pelaku Usaha Mikro	45 Pelaku Usaha Mikro
25	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi (Gudang Non SRG)	Pelaku Usaha	Terjaminnya Ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat	1 Unit	-	-	-	-
26	Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan	Pelaku Usaha	Tersdianya Data Base Potensi Unggulan Daerah	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok
27	Monitoring dan Pengawasan Perizinan	Pelaku usaha	Terlaksananya monitor ing serta tersedianya data informasi Perizinan	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok
28	Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Ber alkohol	Pelaku usaha	Terlaksananya pengawasan dan terkendalinya peredaran minum an beralkohol	14 Kali	14 Kali	14 Kali	14 Kali	14 Kali
29	Sosialisasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Pelaku usaha dan IKM	Meningkatnya omzet Penjualan	14 Klp	14 Klp	14 Klp	14 Klp	14 Klp
30	Sosialisasi Forum Pertemuan Perdagangan Luar Negeri	Pelaku Usaha yang Bergerak dibidang Perdagangan	Meningkatnya pengetahuan manajemen bagi pelaku usaha	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan	Pemerintah Kabupaten Sintang (Pembangunan Pasar Kios/Los)	Terbangunannya Pasar Kios/Los di Kabupaten Sintang	3 Pasar	3 Pasar	2 Pasar	1 Pasar	1 Pasar
2	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Pasar Kios/Los yang memiliki kondisi ≤ 40% (Revitalisasi)	Peningkatan Pasar Kios/Los yang memiliki kondisi ≤ 40%	4 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar
3	Menyediakan fasilitas pendu kung sarana distribusi perdagangan	Pasar Kios/Los milik Pemerintah yang belum memiliki jaringan listrik	Terpasangnya jaringan listrik Pasar Kios/Los Milik Pemerintah	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar
4	Menyediakan Kajian Akademik Draft Raperda Pengelolaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern	Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern	Tersedianya dokumen kajian akademik draft raperda	1 Dok	0	0	0	0
5	Melakukan kaji terap Perda tentang Pengelolaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Terlaksananya kaji terap	1 Kegiatan	0	0	0	0
6	Menyediakan Kajian Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Pasar	Pemerintah Kabupaten Sintang	Tersedianya dokumen kajian pembangunan, penataan dan pengelolaan pasar	1 Dok	0	0	0	1 Dok
7	Meningkatkan Pembinaan Pengguna Fasilitas Pasar Pemerintah	Pengguna Fasilitas Pasar Pemerintah di Kabupaten Sintang	Tersedianya laporan pembinaan pengguna fasilitas pasar pemerintah	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang
8	Melakukan Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar	14 Kecamatan di Kabupaten Sintang	Terlaksananya survey rencana pembangunan dan revitalisasi pasar	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Menetapkan dan Menata Kawasan Sentra PKL	Kecamatan di Kabupaten Sintang yang memiliki PKL	Terbangunan dan Tertatanya Kawasan Sentra PKL	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan
10	Menyusun Perbup tentang Pembentukan UPTD Pasar dan Pengelolaannya	Pemerintah Kabupaten Sintang	Tersusunya Perbup tentang Pembentukan UPTD Pasar dan Pengelolaannya	1 Dokumen	0	0	0	0
11	Meningkatkan Kualitas Data PKL dan Asongan, Penataan dan Fasilitasi	PKL yang ada di Kecamatan se-Kabupaten Sintang	Tersedianya laporan pendataan, penataan dan fasilitasi PKL dan Asongan	1 Dok, 98 Kali	1 Dok, 100 Kali	1 Dok, 120 Kali	1 Dok, 130 Kali	1 Dok, 140 Kali
12	Melakukan Penyuluhan PKL dan Asongan	PKL dan Asongan di Kabupaten Sintang, yang ada di Kecamatan	Tersedianya laporan penyuluhan PKL dan Asongan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
13	Melakukan pendataan dan penempatan pedagang milik Pemerintah	Pedagang yang menempati pasar milik Pemerintah	Tersedianya data dan terlaksananya penempatan pedagang ke pasar pemerintah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
14	Melakukan Pendataan dan Pelayanan Restribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	Pedagang yang menempati pasar milik Pemerintah	Tersedianya data dan terlaksananya pelayanan retribusi pasar grosir dan pertokoan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
15	Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	Petugas penarik retribusi pasar grosir dan pertokoan	Tersedianya sistem informasi pelayanan rtibusi pasar grosir dan pertokoan	0	0	4 Orang	0	0

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 4.2.2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang Bidang Koperasi dan UMKM

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM	14 Kecamatan	Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org
2.	Meningkatkan kualitas UMKM	Meningkatkan kemampuan UMKM dalam berwirausaha	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan pelaku usaha	1 keg 25 org	1 keg 25 org	1 keg 25 org	1 keg 25 org	1 keg 25 org
3.	Meningkatkan kualitas UMKM	Meningkatkan kemampuan UMKM	Berkembangan usaha bagi pelaku UMKM	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
4.	Meningkatkan kualitas UMKM	Meningkatkan kemampuan UMKM	Meningkatnya Kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah	-	14 keg	14 keg	14 keg	14 keg
5.	Meningkatkan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM	Meningkatkan kemampuan UMKM dalam fasilitasi lembaga pembiayaan	Tersedianya fasilitasi pembiayaan bagi koperasi dan umkm melalui lembaga pembiayaan	-	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM
6.	Meningkatkan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM	Meningkatkan kemampuan UMKM dalam fasilitasi lembaga pembiayaan	Tersedianya fasilitasi pembiayaan bagi koperasi dan umkm melalui lembaga pembiayaan	-	14 keg 40 org	14 keg 60 org	14 keg 60 org	14 keg 60 org
7.	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan pelaku usaha	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan pelaku usaha	-	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM
8.	Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kemampuan UMKM	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha	Meningkatnya kemitraan usaha dan pengembangan UMKM		1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM
9.	Meningkatkan kerjasama dan pengembangan UMKM dalam bidang HAKI	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha	Meningkatnya kemitraan usaha dan pengembangan UMKM dalam bidang HAKI	-	1 keg 20 UMKM	1 keg 20 org	1 keg 20 org	1 keg 20 org
10.	Meningkatkan promosi dan hasil produksi UMKM	Terlaksananya promosi produk UMKM	Meningkatnya sarana promosi bagi produk UMKM	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event
11.	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan pelaku usaha	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan pelaku usaha	-	2 keg 50 UMKM	2 keg 50 UMKM	2 keg 50 UMKM	2 keg 50 UMKM

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Meningkatkan pengetahuan bagi UMKM dalam bidang HKI	Terlaksananya sosialisasi tentang HKI bagi UMKM	Meningkatnya pengetahuan UMKM dalam bidang HKI	-	1 keg 30 org	1 keg 30 org	1 keg 30 org	1 keg 30 org
13.	Meningkatkan kemampuan pelaku UMKM	Meningkatkan kemampuan pelaku UMKM	Meningkatnya kemampuan usaha UMKM		1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM
14.	Meningkatkan kemampuan manajemen bagi pengelola Koperasi dan KUD	Meningkatkan kemampuan manajerial bagi pengelola koperasi dan KUD	Meningkatnya kemampuan manajemen pengelolaan Koperasi dan KUD	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM
15.	Tersedianya informasi penyediaan permodalan bagi UMKM	Meningkatkan kemampuan modal usaha bagi UMKM	Meningkatnya informasi penyediaan permodalan usaha bagi UMKM	14 keg	14 keg	14 keg	14 keg	14 keg
16.	Meningkatnya kemampuan UMKM dalam pengembangan klaster bisnis	Berkembangnya klaster bisnis bagi UMKM	Meningkatkan kemampuan UMKM dalam pengembangan klaster bisnis	-	1 keg 30 org	1 keg 30 org	1 keg 30 org	1 keg 30 org
17.	Meningkatnya sarana pemasaran produk UMKM	Terlaksananya pemasaran produk UMKM	Meningkatkan sarana pemasaran produk UMKM	-	1 keg 20 org	1 keg 20 org	1 keg 20 org	1 keg 20 org
18.	Meningkatnya sarana promosi produk UMKM	Terlaksananya promosi produk UMKM	Meningkatkan sarana promosi produk UMKM	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg
19.	Tersedianya Akses Pengembangan dan Pelaporan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi KUMKM	Tersedianya informasi dan data peminjam	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan pemantauan	-	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM
20.	Meningkatnya SDM pelaku usaha penggerak ekonomi kerakyatan	Meningkatkan SDM usaha penggerak ekonomi kerakyatan	Jumlah pelaku usaha yang terlatih	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM
21.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha Mikro kecil menengah	Meningkatkan kemampuan SDM bagi UMKM	Terselnggaranya kegiatan pembinaan usaha bagi UMKM	-	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM
22.	Meningkatnya sarana dan prasarana koperasi	Meningkatkan sarana dan prasarana koperasi	Meningkatkan sarana dan prasarana koperasi		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
23.	Meningkatnya informasi tentang data yang akurat tentang UMKM	Tersedianya informasi dan data UMKM	Menyediakan informasi tentang data yang akurat ttg UMKM	7 buku	7 buku	7 buku	7 buku	7 buku
24.	Terlaksananya pelayanan usaha terpadu bagi KUMKM di Kab. Sintang	Meningkatkan pelayanan bagi KUMKM	Meningkatnya pelayanan bagi KUMKM di Kab. Sintang	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Tersedianya data kebijakan dan program pembangunan koperasi	Meningkatkan persamaan persepsi tentang kebijakan dan program pembangunan koperasi	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
26.	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Adanya personel auditing bagi pengawasan koperasi	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit
27.	Meningkatkan Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Adanya informasi bagi Pengelola Koperasi tentang pengembangan perkoperasian	Meningkatnya Pembang unan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	-	50 Kop	50 Kop	50 Kop	50 Kop
28.	Meningkatkan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Meningkatnya sosialisasi prinsip - prinsif pemahaman perkoperasian	-	20 Kop	25 Kop	30 Kop	40 Kop
29.	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Meningkatkan kualitas dalam pengelolaan koperasi	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	14 do	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok
30.	Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama usaha koperasi	Meningkatkan jaringan kerjasama usaha koperasi	Meningkatnya dan berkembangnya jaringan kerjasama usaha koperasi	-	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok
31.	Melaksanakan penyebaran model pola pengembangan koperasi	Mengembangkan model pola perkoperasian	Terlaksananya penyebaran model pola pengembangan koperasi	-	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok
32.	Melaksanakan rintisan penerapan tekhnologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Menerapkan tekhnologi/manajemen modern dalam usaha koperasi	Terlaksananya rintisan penerapan tekhnologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
33.	Meningkatkan sarana dan prasarana usaha koperasi	Meningkatkan usaha koperasi	Meningkatnya sarana dan prasarana usaha koperasi	1 keg 1 pasar	1 keg 1 pasar	1 keg 1 pasar	1 keg 1 pasar	1 keg 1 pasar
34.	Meningkatkan pengetahuan pengelola koperasi yang terlatih	Tersedianya pengelola Koperasi yang terlatih	Meningkatnya pengetahuan pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen	1 keg 20 kop/KUD	1 keg 20 kop/KUD	1 keg 20 kop/KUD	1 keg 20 kop/KUD	1 keg 20 kop/KUD
35.	Tersedianya informasi perkembangan Koperasi / KUD	Adanya data valid tentang perkembangan Koperasi/KUD	Meningkatnya kualitas Koperasi / KUD	-	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok
36.	Tersedianya personel auditing bagi pengawas koperasi	Adanya personel auditing bagi pengawasan koperasi	Meningkatkan pengetahuan personel auditing bagi pengawas koperasi	-	30 Kop	30 Kop	30 Kop	30 Kop

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Tersedianya personel akuntan bagi pengawas/pengelola koperasi	Adanya personel akuntan bagi pengawasan koperasi	Meningkatnya personel akuntan bagi pengawas/pengelola koperasi	-	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop
38.	Penilaian kualitas kelembagaan koperasi berprestasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi berprestasi	Adanya penilaian kualitas kelembagaan koperasi berprestasi	-	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop
39.	Meningkatkan Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi UMKM	Menguatkan sistim pen dukung usaha bagi UMKM	Meningkatnya Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi UMKM	49 Kop	10 Kop	10 Kop	10 Kop	10 Kop
40.	Meningkatkan pelayanan pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi	Terselenggaranya pelayanan thp pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi	Terlaksananya pelayanan pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi	25 kop	25 kop	25 kop	25 kop	25 kop
41.	Adanya personel analisa laporan keuangan	Tersedianya personel analias laporan keuangan	Adanya personel analisa laporan keuangan yang terlatih	50 kop	50 kop	50 kop	50 kopq50 kop	50 koperasi
42.	Meningkatkan pelatihan penyusunan rencana pelatihan usaha bisnis (bisnis plan) koperasi	Terselenggaranya pelatihan penyusunan rencana pelatihan usaha bisnis (bisnis plan)	Meningkatnya personel penyusunan rencana pelatihan usaha bisnis (bisnis plan) koperasi	25 kop	25 kop	25 kop	25 kop	25 kop
43.	Meningkatkan pengawasan koperasi penerima fasilitas bantuan APBD	Melaksanakan pengawasan koperasi penerima fasilitas bantuan APBD	Meningkatnya pengawasan koperasi penerima fasilitas bantuan APBD	1 keg 10 Kop 10 sekolah	1 keg 10 Kop 10 sekolah	1 keg 10 Kop 10 sekolah	1 keg 10 Kop 10 sekolah	1 keg 10 Kop 10 sekolah
44.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi bansos Kemenkop dan UKM	Melaksanakan monitoring dan evaluasi bansos Kemenkop dan UKM	Meningkatnya monitoring dan evaluasi bansos Kemenkop dan UKM	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop	30 kop
45.	Adanya kegiatan pelaksanaan kegiatan hari Koperasi Nasional, Propinsi dan Kabupaten	Menyelenggarakan kegiatan hari Koperasi Nasional, Propinsi dan Kabupaten	Adanya kegiatan pelaksanaan kegiatan hari Koperasi Nasional, Propinsi dan Kabupaten	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
46.	Meningkatkan peran organisasi gerakan koperasi	Adanya peran organisasi gerakan koperasi dalam dunia usaha	Meningkatnya peran organisasi gerakan koperasi	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
47.	Tersedianya data koperasi yang valid	Menyediakan data koperasi yang valid	Adanya data koperasi yang valid	-	1 keg 7 buku	1 keg 7 buku	1 keg 7 buku	1 keg 7 buku

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	Meningkatkan kualitas koperasi / KUD	Meningkatkan kualitas koperasi/KUD yang sehingga lebih aktif	Meningkatnya kualitas koperasi / KUD	-	1 keg 60 kop	1 keg 60 kop	1 keg 60 kop	1 keg 60 kop
49.	Meningkatkan pengawasan terhadap pemberian IUMK	Terselenggaranya IUMK bagi UMK	Adanya pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian IUMK	50 IUMK	50 IUMK	50 IUMK	50 IUMK	50 IUMK

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 2016-2021, terfokus pada upaya mewujudkan pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berdaya saing global, secara bertahap, merata dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berdaya saing global, maka Strategi Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. ***Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah***, adalah Strategi Pembangunan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana industri serta meningkatkan mutu hasil industri, diversifikasi produk dan inovasi produk. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan standar hasil produksi serta mendorong pelaku usaha IKM meningkatkan daya saing di pasar global.
2. ***Strategi Pengembangan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan*** adalah Strategi Pembangunan dan Pengembangan yang terpadu pada upaya tersedianya sarana dan prasarana perdagangan bagi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Strategi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten sampai pada daerah yang terpencil dan terisolir untuk ketersediaan pasokan bahan pokok bagi kebutuhan masyarakat dengan standar yang relatif terjangkau.
3. ***Strategi Pengembangan Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah*** yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat perkoperasian. Strategi ini diarahkan memacu perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang khususnya dari masyarakat Perkoperasian, Pengusaha Kecil dan Pengusaha Menengah dalam mengembangkan usahanya di bidang Industri, Perdagangan dan Jasa.
4. ***Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur***, adalah Strategi Pembangunan untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pelayanan Publik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Misi dan tujuan yang jelas, terukur dan terarah.

4.3.2 Kebijakan

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 seperti tersebut diatas dan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sintang Periode 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan

Sejahtera, yang didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada tahun 2021“ dan Misi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 khususnya pada point (3) “Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah” dan point (5) “Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Maka langkah-langkah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Hilirisasi Industri
2. Meningkatkan Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa
3. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis pada Koperasi, UMKM, IKM dan masyarakat.
4. Meningkatkan Penguatan Lembaga dan Usaha Koperasi dan UMKM
5. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
6. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan Perdagangan
7. Meningkatkan dan menanamkan jiwa kewirausahaan masyarakat, Koperasi dan UMKM
8. Meningkatkan mutu dan diver sifikasi Produk dan Pemasaran Produk Koperasi/UMKM/IKM
9. Meningkatkan akses dan sumber permodalan bagi Koperasi/ UMKM /IKM
10. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian .
11. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
12. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
13. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan

Secara keseluruhan tujuan, sasaran dan kebijakan yang terkait dengan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tergambar pada Tabel 4.3.2.1 berikut ini :

Tabel 4.3.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Sintang

VISI : Terwujudnya Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang Maju dan Mandiri.			
Misi I : Menjadikan Pasar yang kondusif dan Modern sebagai Pilar Ekonomi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1. Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal 2. Terbinanya Kelompok PKL dan Asongan 3. Terlayaninya pedagang yang menempati pasar milik pemerintah	Pengembangan Sarana barang dan Jasa	a. Meningkatkan Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa b. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri dan Perdagangan c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Misi II : Menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai Penunjang utama Ekonomi Pedesaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM 2. Meningkatkan kualitas UMKM 3. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kemampuan UMKM 4. Meningkatkan promosi dan hasil produksi UMKM 5. Meningkatnya kemampuan kewirausahaan pelaku usaha 6. Meningkatkan kemampuan manajemen dan Usaha Koperasi	Masyarakat , Koperasi dan UMKM.	Strategi Pengembangan Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah	a. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis pada Koperasi, UMKM, IKM dan masyarakat. b. Meningkatkan Penguatan Lembaga dan Usaha Koperasi dan UMKM c. Meningkatkan dan menanam kan jiwa kewira usahaan masya rakat, Koperasi dan UMKM d. Meningkatkan mutu dan diver sifikasi Produk dan Pemasaran Produk Koperasi/UMKM/IKM e. Meningkatkan akses dan sumber permodalan bagi Koperasi/ UMKM /IKM f. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian g. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Misi III : Menumbuhkan Industri Kecl dan Menengah di Pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya daya saing potensi unggulan daerah	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	a. Hilirnisasi Industri b. Pertumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah c. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana Industri.
Misi IV : Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Sentra Ekonomi Daerah	Terwujudnya Sentra Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Keunggulan Lokal	Strategi Pengembangan Sarana Perdagangan dan Jasa	a. Meningkatkan Optimalisasi Akses Distribusi Perdagangan Barang dan Jasa b. Meningkatkan perlindungan, pemantauan, Pengawasan, dan Penilaian c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat d. Meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana prasarana.
Misi V: Mewujudkan Aparatur Dinas Perindagkop dan UKM yang Profesional dan Kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya pelayanan prima dan tertib administrasi perkantoran 2. Terwujudnya pemeliharaan sarana operasional kantor 3. Terwujudnya aparatur yang disiplin 4. Terwujudnya aparatur yang berkualitas dan potensial 5. Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelayanan prima dan tertib administrasi Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Meningkatkan disiplin aparatur Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur	a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur c. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan d. Tesedianya sarana yang memadai.

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, Maka Program Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan di sertai dengan kebutuhan pendanaan seperti dalam matrik di bawah ini:

5.1.1 Sekretariat

5.1.1.1Pelayanan Administrasi Perkantoran Meliputi:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
k. Penyediaan Makanan dan Minuman
l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
m. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
n. Pameran Pembangunan
o. Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
p. Pendataan dan Penataan Dokumen Aset

5.1.1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meliputi:

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
c. Pemeliharaan Perangkat komputer dan Printer
d. Rehab Berat Gedung Kantor
e. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
f. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
g. Pengadaan AC dan Kipas Angin

5.1.1.3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meliputi :

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.1.1.4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

b. Penyusunan Laporan Akhir Tahun

5.1.1.5 Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

5.1.2 Bidang Perindustrian

5.1.2.1 Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

a. Penumbuhan dan Pengembangan sentra Industri Kecil

b. Penyuluhan Bimbingan Industri Kecil Menengah

c. Menyelenggarakan Pameran Produk Kerajinan Rakyat, IKM, Kalbar Expo

d. Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Daerah (REPIDA)

e. Sosialisasi Depot air minum

f. Pembinaan IKM langsung

g. Desiminasi informasi produk unggulan dan teknologi tepat guna

5.1.2.2 Peningkatan Kemampuan Teknologi

1. Menyelenggarakan Bimtek Pembuat Kerajinan Rotan
2. Pengembangan Industri Hilir Karet (Pembuatan Ban dan sarung Tangan)
3. Melakukan Pengawasan dan Pengujian bahan baku industri
4. Menyelenggarakan Bimtek *Packing* makanan dan minuman.
5. Menyelenggarakan bimtek modifikasi Bordir dan Fashion, bata merah, tenun ikat, nata de coco, pandai besi, pengolahan jagung, cabe, tepung tapioka
6. Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana industri
7. Peningkatan Pengembangan Produk IKM (Rotan, Cabe, Gula aren, tenun Ikat, fashion, ikan, tahu, nata de coco)
8. Sosialisasi pembuatan PIRT, sertifikasi halal dan HKI

5.1.2.3 Penataan Struktur Industri

1. Monitoring dan pendataan usaha industri
2. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan IKM
3. Melakukan Latihan Kerja ke sentra yang lebih maju
4. Peningkatan sarana dan Prasarana gedung Galeri

5. Pengembangan komptensi Inti Industri Daerah
6. Gugus kendali Mutu Pengujian Mutu Produksi Kompos
7. Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Perizinan Usaha Industri
8. Bantuan Mesin Peralatan IKM (Pengolahan Cabe, Gula Aren, batako pres, mesin jahit, mesin tebu, mesin kopi bubuk, mesin pres sampah anorganik)
9. Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan.
10. Pembangunan IKM dan Kawasan IKM serta utilitasnya

5.1.2.4 Penyuluhan Perindustrian Dan Perdagangan

1. Gugus Kendali Mutu bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

5.1.2.5 Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

1. Pengadaan mesin pencacah sampah anorganik
2. Pengadaan mesin pres sampah anorganik
3. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

5.1.3 Bidang Perdagangan

5.1.3.1 Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

1. Monitoring harga kebutuhan pokok
2. Pengawasan pupuk dan BBM bersubsidi
3. Monitoring Peredaran barang dan jasa
4. Pembentukan BPSK
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana BPSK
6. Monitoring dan Pemantauan barang Kadaluarsa dan Kelengkapan Label
7. Sosialisasi UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
8. Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang
9. Fasilitasi Pembentukan LPKBM
10. Pendidikan dan Pelatihan Penera/Calon Penera

5.1.3.2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1. Pembangunan UPT Metrologi Legal
2. Pendidikan dan pelatihan Kemetrologian
3. Pengadaan Alat UTTP
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Metrologi Legal
5. Pemantauan/Pengawasan Penggunaan Alat Ukur ,Takar, Timbang dan Peralatannya
6. Kegiatan Tera/tera Ulang Alat UTTP
7. Sosialisasi UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

8. Pembentukan Pasar tertib Ukur
9. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang Nasional
10. Pengadaan Unit Laboratorium Pengujian Mutu Barang Berjalan
11. Forum Konsumen Cerdas
12. Monitoring dan Pengawasan Perizinan
13. Pengawasan/Pemantauan Mutu Produk AMDK/AMIU dan Pemasarannya
14. Pemantauan/Pengawasan Produk Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI)
15. Monitoring terhadap makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya
16. Operasi Pasar
17. Fasilitasi Pasar Murah
18. Pemantauan Stok Kebutuhan Pokok melalui Penguatan jaringan Distribusi
19. Pendidikan/Pelatihan Penyusunan prognosa bahan pokok
20. Fasilitasi Kemitraan Usaha Perdagangan.
21. Sosialisasi terhadap Produk Hukum Pemerintah atau PERDA
22. Partisipasi pada Pameran Produk di dalam dan Luar Negeri
23. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
24. Sosialiasi Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian

5.1.4 Bidang Pasar

5.1.4.1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan: Pembangunan Pasar Kios/Los Desa Mangkurat Baru Kecamatan Tempunak, Pembangunan Pasar Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu, Pembangunan Pasar Nanga Tikan Kecamatan Kayan Hilir, Pembangunan Pasar Rakyat Lingkar Kelam, Pembangunan Pasar Rakyat Desa Merarai Satu Kecamatan Sungai Tebelian, Pembangunan Pasar Daging Babi Kecamatan Sintang, Pembangunan Pasar Sementara Terminal Tanjung Puri
2. Revitalisasi Pasar Kios/Los: Pasar Terminal Tanjung Puri Kecamatan Sintang, Pasar Serawai Kecamatan Serawai, Pasar Tebidah Kecamatan Kayan Hulu dan Revitalisasi Pasar/Kios Nanga Senaning KecamatanKetungau Hulu.
3. Pemasangan jaringan Listrik
4. Penyusunan Kajian Akademik Draf Raperda Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
5. Kaji Terap Peraturan Daerah (PERDA) tentang pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
6. Penyusunan Kajian Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Sintang

7. Pembinaan Pengguna Fasilitas Pasar Pemerintah
8. Pendataan dan Penataan Pedagang dan PKL di Kabupaten Sintang
9. Survey Rencana Pembangunan dan Revitalisasi Pasar
10. Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pasar Pemerintah
11. Penetapan Kawasan Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL)
12. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD Pasar dan pengelolaannya
13. Pendataan dan Penempatan Pedagang Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Sintang
14. Pendataan dan Pelayanan Restribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
15. Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan

5.1.4.2 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1. Pendataan, Penataan dan Fasilitasi bagi PKL dan Asongan di Kab.Sintang
2. Penyuluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan

5.1.5 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

5.1.5.1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi dan Penilaian Kelayakan Usaha UMKM
2. Pengawasan Koperasi Penerima Fasilitas bantuan
3. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
4. Pembinaan administrasi dan Manajemen Koperasi
5. Sosialisasi Prinsip Prinsip Koperasi
6. Pendataan Koperasi
7. Pelatihan Perkoperasian Bagi Kader Koperasi

5.1.5.2 Program Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Fasilitasi Pembiayaan UMKM dan Koperasi pada Koperasi, Perbankan dan Lembaga lainnya
2. Fasilitasi Bantuan Modal Usaha Simpan Pinjam
3. Sosialisasi Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

5.1.5.3 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

1. Fasilitas Peningkatan Kemitraan UMKM.
2. Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi di Daerah Tertinggal/Perbatasan/Pasca Bencana
3. Memfasilitasi Standarisasi & Mutu Produk UMKM
4. Pelatihan Manajemen Pengelola/ Koperasi/KUD

5.1.5.4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

1. Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM
2. Pelatihan Pengembangan SDM bagi Penggerak Ekonomi Kerakyatan.
3. Pelatihan Teknis Ketrampilan Tenun Ikat Dayak
4. Pelatihan Tehnis Ketrampilan Menjahit.
5. Sosialisasi dukungan Informasi Penyediaan Permodalan.
6. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah.
7. Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi Koperasi dan UMKM
8. Sosialisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada KUKM
9. Penyelenggaraan Promosi & Pameran Produk KUMKM
10. Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro Kecil.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD TAHUN 2016 - 2021

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	**(11)**	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program Pencapaian iklim usaha yang kondusif pada UMKM	Terlaksananya kegiatan dalam rangka pencapaian iklim usaha yang kondusif bagi UMKM	181,839			182,289	700.000.000	182,514	725.000.000	182,739	730.000.000	182,780	740.000.000	182,965	750.000.000
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pada UMKM						1.095.000.000		1.115.000.000		1.125.000.000		1.145.000.000		1.150.000.000
Program Pengembangan sistem pendukung usaha pada UMKM						1.590.400.000		1.645.400.000		1.700.400.000		1.745.400.000		1.810.400.000
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi						3.376.300.000		3.421.300.000		3.441.300.000		3.466.300.000		3.501.300.000
Program Peningkatan Efisensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB			8.542.665.900		10.592.932.400		10.477.625.640		9.656.888.204		6.953.877.024		7.144.764.727
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terbinanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan			64.370.000		140.807.000		154.887.700		170.376.470		187.414.117		290.008.529
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	17,60	17,70	210.295.600	17,80	1.057.569.880	17,90	1.000.815.399	18,00	1.100.896.941	18,10	1.210.986.638	18,15	1.282.085.304
Program Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)			1.055.001.900		11.772.404.590		1.949.645.049		2.144.809.554		2.359.070.510		2.594.977.061

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	**(11)**	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	10.03	10.10		10.25	2.793.000.000	10.35	1.666.500.000	10.45	2.914.100.000	10.55	2.004.910.000	10.65	1.950.191.000
Program Penataan Struktur Industri						533.040.000		21.146.740.000		36.254.920.000		20.822.822.000		20.897.524.000
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						819.384.400		1.573.984.400		1.667.544.400		1.680.152.450		1.782.860.050
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi						150.000.000		350.000.000		500.000.000		505.000.000		505.000.000
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial						75.000.000		25.000.000		2.025.000.000		25.000.000		25.000.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang. Penetapan Kinerja Indikator Kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu capaian.

Untuk indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 6.1.1 berikut ini:

Tabel 6.1.1

INDIKATOR KINERJA DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BIDANG PERDAGANGAN

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Sampel	24 Sampel	-	-	-	-	-	24 Sampel
2.	Jumlah Jenis Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	14 Kecamatan	8 Jenis UTTP	8 Jenis UTTP	8 Jenis UTTP	8 Jenis UTTP	8 Jenis UTTP	8 Jenis UTTP
3.	Jumlah Depot Air Minum	11 Sampel	10 Sampel	10 Sampel	13 Sampel	14 Sampel	15 Sampel	73 Sampel
4.	Jumlah Produksi SNI yang diawasi	-	3 Sampel	3 Sampel	3 Sampel	4 Sampel	5 Sampel	18 Sampel
5.	Jumlah Pelaku Usaha yang di Monitoring	-	30 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha
6.	Jumlah Distributor Pupuk dan SPBU serta Laporan Hasil Pengawasan.	10 Buku	3 Distributor 12 SPBU	3 Distributor 12 SPBU	3 Distributor 12 SPBU	3 Distributor 12 SPBU	3 Distributor 12 SPBU	3 Distributor 12 SPBU
7.	1 BPSK	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok
8.	Jumlah Mobeler Sarana dan Prasarana BPSK	-	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	25 Paket
9.	Jumlah Dokumen	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok
10.	Jumlah Kelompok	-	14 Kelpk	14 Kelpk	14 Kelpk	14 Kelpk	14 Kelpk	14 Kelpk
11.	Jumlah Kelompok Konsumen Cerdas	-	2 Klpk (40 Pelajar)	2 Klpk (40 Pelajar)	2 Klpk (40 Pelajar)	2 Klpk (40 Pelajar)	2 Klpk (40 Pelajar)	2 Klpk (40 Pelajar)
12.	Jumlah OP	-	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	20 Kali
13.	Jumlah Fasilitas Pasar Murah	-	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	20 Kali

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Jumlah Monitoring Sembako	1 Dok	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali
15.	Jumlah UPT Metrologi Legal	-	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit
16.	Jumlah Mobeler Sarana dan Prasarana UPTD	-	1 Pekat	1 Pekat	1 Pekat	1 Pekat	1 Pekat	5 Paket
17.	Jumlah Kelompok	-	14 Kelompok	14 Kelompok	14 Kelompok	14 Kelompok	14 Kelompok	14 Kelompok
18.	Jumlah UTTP	-	800 UTTP	880 UTTP	960 UTTP	1.040 UTTP	1.120 UTTP	4.800 UTTP
19.	Jumlah Pasar Tertib Ukur	-	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	5 Pasar
20.	Jumlah Kegiatan Tera-tera Ulang	-	14 Kali	14 Kali	14 Kali	14 Kali	14 Kali	14 Kec/Kab.Sintang
21.	Jumlah Event Promosi	1 Event	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event	2 Event	10 Event
22.	Jumlah Dok Laporan	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dokumen
23.	Jumlah Pelaku Usaha	-	210 Pelaku Usaha	225 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	255 Pelaku Usaha	270 Pelaku Usaha	1.200 Pelaku Usaha
24.	Jumlah Pelaku Usaha Mikro	-	20 Pelaku Usaha Mikro	25 Pelaku Usaha Mikro	30 Pelaku Usaha Mikro	35 Pelaku Usaha Mikro	45 Pelaku Usaha Mikro	155 Pelaku Usaha Mikro
25.	Jumlah Gudang	-	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit
26.	Jumlah Data Informasi Potensial Unggulan	-	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dokumen

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Jumlah Dok. Dan Data Pelaku Usaha yang sudah dan Belum Memiliki Izin	13 Kec. Dan 1 Dokumen	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dokumen
28.	Jumlah Frekuensi Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	-	14 Kali	14 Kali	14 Kali	14 Kali	14 Kali	14 Kali
29.	Jumlah Kelompok	-	14 Klpk	14 Klpk	14 Klpk	14 Klpk	14 Klpk	14 Kelompok
30.	Sosialisasi Forum Pertemuan Perdagangan Luar Negeri	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 6.1.2

INDIKATOR SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BIDANG KOPERASI DAN UMKM

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.15.									
	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan pelaku usaha	-	1 keg 25 org	1 keg 25 org	1 keg 25 org	1 keg 25 org	1 keg 25 org	1 keg 25 org	6 keg 150 org
	Berkembangan usaha bagi pelaku UMKM	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	5 keg
	Meningkatnya Kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	14 keg	14 keg	14 keg	14 keg	14 keg	70 keg
	Tersedianya fasilitasi pembiayaan bagi koperasi dan umkm melalui lembaga pembiayaan	-	-	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM	5 keg 150 UMKM
	Tersedianya fasilitasi pembiayaan bagi koperasi dan umkm melalui lembaga pembiayaan	-	-	14 keg 40 org	14 keg 60 org	14 keg 60 org	14 keg 60 org	14 keg 60 org	70 keg 60 org
1.15.									
	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan pelaku usaha	-	-	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM	1 keg 30 UMKM	5 keg 150 UMKM
	Meningkatnya kemitraan usaha dan pengembangan UMKM			1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM	5 keg 20 UMKM
	Meningkatnya kemitraan usaha dan pengembangan UMKM dalam bidang HAKI	-	-	1 keg 20 UMKM	1 keg 20 org	1 keg 20 org	1 keg 20 org	1 keg 20 org	5 keg 100 org
	Meningkatnya sarana promosi bagi produk UMKM	2 Pameran	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	12 event

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan pelaku usaha	-	-	2 keg 50 UMKM	50 UMKM	2 keg 50 UMKM	3 keg 50 UMKM	4 keg 50 UMKM	10 keg 250 UMKM
	Meningkatnya pengetahuan UMKM dalam bidang HKI	-	-	1 keg 30 org	1 keg 30 org	1 keg 30 org	1 keg 30 org	1 keg 30 org	5 keg 150 org
	Meningkatnya kemampuan usaha UMKM			1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM	1 keg 20 UMKM	5 keg 100 UMKM
	Meningkatnya kemampuan manajemen pengelolaan Koperasi dan KUD	14 kec 30 org	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	210 UMKM
1.15.									
	Meningkatnya informasi penyediaan permodalan usaha bagi UMKM	1 keg	14 keg	14 keg	14 keg	14 keg	14 keg	14 keg	84 keg
	Meningkatkan kemampuan UMKM dalam pengembangan klaster bisnis	-	-	1 keg 30 org	1 keg 30 org	1 keg 30 org	1 keg 30 org	1 keg 30 org	5 keg 150 org
	Meningkatkan sarana pemasaran produk UMKM	-	-	1 keg 20 org	1 keg 20 org	1 keg 20 org	1 keg 20 org	1 keg 20 org	5 keg 100 org
	Meningkatkan sarana promosi produk UMKM	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	21 keg
	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan pemantauan	14 Kec 50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	350 UMKM
	Jumlah pelaku usaha yang terlatih	-	-	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	150 UMKM
	Terselnggaranya kegiatan pembinaan usaha bagi UMKM	-	-	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	150 UMKM
	Meningkatkan sarana dan prasarana koperasi			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit
	Menyediakan informasi tentang data yang akurat ttg UMKM	-	7 buku	7 buku	7 buku	7 buku	7 buku	7 buku	42 buku

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya pelayanan bagi KUMKM di Kab. Sintang	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	5 unit
1.15.									
	Meningkatkan persamaan persepsi tentang kebijakan dan program pembangunan koperasi	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	6 keg
	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-	-	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	70 unit
	Meningkatnya Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	-	-	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	250 Koperasi
	Meningkatnya sosialisasi prinsip - prinsif pemahaman perkoperasian	-	-	20 Koperasi	25 Koperasi	30 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi	165 Koperasi
	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	14 kec 13 koperasi	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	84 dokumen
	Meningkatnya dan berkembangnya jaringan kerjasama usaha koperasi	-	-	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	70 dokumen
	Terlaksananya penyebaran model pola pengembangan koperasi	-	-	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen
	Terlaksananya rintisan penerapan tekhnologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	5 keg
	Meningkatnya sarana dan prasarana usaha koperasi	-	1 keg 1 pasar tradisional	1 keg 1 pasar tradisional	1 keg 1 pasar tradisional	1 keg 1 pasar tradisional	1 keg 1 pasar tradisional	1 keg 1 pasar tradisional	6 keg 6 psr tradisional
	Meningkatnya pengetahuan pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen	-	1 keg 20 koperasi /KUD	1 keg 20 koperasi /KUD	1 keg 20 koperasi /KUD	1 keg 20 koperasi /KUD	1 keg 20 koperasi /KUD	1 keg 20 koperasi /KUD	6 keg 120 koperasi /KUD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas Koperasi / KUD	-	-	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	70 dokumen
	Meningkatkan pengetahuan personel auditing bagi pengawas koperasi	-	-	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	150 koperasi
	Meningkatnya personel akuntan bagi pengawas/pengelola koperasi	-	-	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	150 koperasi
	Adanya penilaian kualitas kelembagaan koperasi berprestasi	-	-	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	150 koperasi
	Meningkatnya Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi UMKM	40 Kop/UMKM	49 Kop/UMKM	10 Kop	10 Kop	10 Kop	10 Kop	10 Kop	139 koperasi
	Terlaksananya pelayanan pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi	-	25 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	150 koperasi
	Adanya personel analisa laporan keuangan yang terlatih	-	50 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	300 koperasi
	Meningkatnya personel penyusunan rencana pelatihan usaha bisnis (bisnis plan) koperasi	-	25 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	25 koperasi	150 koperasi
	Meningkatnya pengawasan koperasi penerima fasilitas bantuan APBD	1 kegiatan	1 keg 10 Kop 10 sekolah	1 keg 10 Kop 10 sekolah	1 keg 10 Kop 10 sekolah	1 keg 10 Kop 10 sekolah	1 keg 10 Kop 10 sekolah	1 keg 10 Kop 10 sekolah	6 keg 60 Kop 60 sekolah
	Meningkatnya monitoring dan evaluasi bansos Kemenkop dan UKM	1 keg	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	150 koperasi	6 keg
	Adanya kegiatan pelaksanaan kegiatan hari Koperasi Nasional, Propinsi dan Kabupaten	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	6 keg
	Meningkatnya peran organisasi gerakan koperasi		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	6 keg

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Adanya data koperasi yang valid	-	-	1 keg 7 buku	1 keg 7 buku	1 keg 7 buku	1 keg 7 buku	1 keg 7 buku	5 keg 35 buku
	Meningkatnya kualitas koperasi / KUD	-	-	1 keg 60 koperasi	1 keg 60 koperasi	1 keg 60 koperasi	1 keg 60 koperasi	1 keg 60 koperasi	5 keg 300 koperasi
	Adanya pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian IUMK	1 keg	50 IUMK	50 IUMK	50 IUMK	50 IUMK	50 IUMK	50 IUMK	300 IUMK

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

TABEL 6.1.3
INDIKATOR, KINERJA DISPERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BIDANG PASAR

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Pasar yang Dibangunan Baru	7 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	2 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	17 Pasar	1
2	Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	0	4 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	12 Pasar	2
3	Jumlah Pasar yang Terpasang Jaringan Listrik	4 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	14 Pasar	3
4	Jumlah Dokumen Draft Raperda	0	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	4
5	Jumlah Kegiatan Kaji Terap	0	1 Kegiatan	0	0	0	0	1 Kegiatan	5
6	Jumlah Dokumen Kajian	0	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2 Dokumen	6

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Jumlah Pedagang yang Dibina	0	120 Pedagang	120 Pedagang	120 Pedagang	120 Pedagang	120 Pedagang	600 Pedagang	7
8	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Pasar	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	8
9	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pasar	1 Paket	0	0	0	0	0	1 Paket	9
10	Jumlah Pasar yang Ditata	1 Pasar	0	0	0	0	0	1 Pasar	10
11	Jumlah Kawasan Sentra PKL	0	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	5 Kawasan	11
12	Jumlah Peraturan Bupati	0	1 Perbup	0	0	0	0	1 Perbup	12
13	Jumlah Pedagang dan PKL yang Ditertibkan	1 Paket	0	0	0	0	0	1 Paket	13
14	Jumlah Dokumen Pendataan, Penataan dan Fasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	14
15	Jumlah PKL dan Asongan yang Mendapat Penyuluhan	0	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	1500 Orang	15

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

Tabel 6.1.4
INDIKATOR KINERJA DISPERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN SINTANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlatihnya pelaku usaha lateks karet pekat	0	25 orang	30 orang	35 orang	40 orang	45 orang	175 orang
2	Tercapainya kemampuan pengrajin dalam mengolah bata merah	0	15 orang	20 orang	25 orang	30 orang	40 orang	130 orang
3	Terlatihnya pengrajin tenun ikat	0	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	50 orang
4	Terlatihnya pelaku usaha pengolahan makanan dan kerajinan	0	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100 orang
5	Terlatihnya pelaku IKM fashion/tekstil	0	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100 orang
6	Tercapainya kemampuan pengolahan lada oleh pelaku usaha lada	0	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	25 kelompok
7	Terlatihnya kemampuan pengolahan makanan hasil ikan	0	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	75 orang
8	Terlatihnya pelaku IKM Nata de Coco	0	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100 orang
9	Tercapainya produk IKM berizin	0	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100 orang
10	Terlatihnya pelaku IKM makanan	0	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100 orang
11	Terlatihnya pengolahan tepung jagung	0	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	75 orang
12	Terlatihnya kemampuan pengolahan rotan	0	25 orang	30 orang	0	40 orang	0	95 orang
13	Tercapainya kemampuan pengolahan tepung tapioka	0	15 orang	0	25 orang	0	40 orang	80 orang
14	Tercapainya kemampuan pandai besi	0	10 orang	0	15 orang	20 orang	0	45 orang
15	Tercapainya kemampuan pengolahan tahu	0	20 orang	20 orang	0	20 orang	20 orang	80 orang

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Terlatihnya pelaku usaha mebel kayu	0	15 orang	0	15 orang	0	15 orang	45 orang
17	Terlatihnya pengolahan jagung	0	10 orang	0	10 orang	15 orang	0	35 orang
18	Terlatihnya pengolahan cabe	0	10 orang	10 orang	0	15 orang	0	35 orang
19	Tebantunya pengrajin tenun ikat	0	5 kelompok	0	6 kelompok	0	8 kelompok	19 kelompok
20	Terbantunya IKM minyak atsiri	0	0	5 kelompok	0	5 kelompok	0	10 kelompok
21	Terbantunya kelompok pengolahan tahu	0	3 kelompok	0	5 kelompok	0	6 kelompok	74 M2
22	Terbantunya kelompok pengolahan batako press	0	0	7 kelompok	0	7 kelompok	0	14 kelompok
23	Terbantunya kelompok pengolahan tapioka	0	6 kelompok	0	6 kelompok	0	0	12 kelompok
24	Terbantunya kelompok pengolaha kopi bubuk	0	3 kelompok	0	5 kelompok	0	0	8 kelompok
25	Terbantunya kelompok usaha fashion/tekstil	0	0	5 kelompok	0	7 kelompok	0	12 kelompok
26	Terbantunya kelompok pengolahan ikan	0	4 kelompok	0	6 kelompok	0	0	10 kelompok
27	Terbantunya kelompok pengolahan tebu	0	5 kelompok	0	5 kelompok	0	5 kelompok	15 kelompok
28	Terbantunya kelompok pengolahan jagung	0	5 kelompok	0	5 kelompok	0	5 kelompok	15 kelompok
29	Terbantunya kelompok pandai besi	0	6 kelompok	0	6 kelompok	0	0	12 kelompok
30	Terbantunya kelompok mebel kayu	0	5 kelompok	0	5 kelompok	0	0	10 kelompok
31	Terbantunya kelompok pengolahan tepung lada	0	0	6 kelompok	0	6 kelompok	0	12 kelompok
32	Terbantunya kelompok pengolahan cabe	0	2 kelompok	0	2 kelompok	0	0	4 kelompok

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Terbentuknya Gugus Kendali Mutu (GKM) Kab. Sintang	0	1 Gugus	0	1 Gugus	0	1 Gugus	3 gugus
34	Terpantaunya pertumbuhan industri di Kab. Sintang	0	60 IKM	75 IKM	85 IKM	90 IKM	100 IKM	410 IKM
35	Terpantaunya perkembangan AMDK dan DAMIU di Kab. Sintang	0	10 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	50 IKM
36	Terselesaikannya rencana pembangunan industri daerah	0	1 REPIDA	1 REPIDA	1 REPIDA	1 REPIDA	1 REPIDA	5 REPIDA
37	Tercapainya gedung galeri yang memadai	15 Jenis	15 Jenis	25 Jenis	30 Jenis	35 Jenis	40 Jenis	145 jenis
38	Terpantaunya, terkendalinya dan terawasinya perizinan IUI dan TDI	20 IKM	20 Unit usaha	20 Unit usaha	20 Unit usaha	20 Unit usaha	20 Unit usaha	100 Unit usaha
39	Termonitornya industri formal di Kab. Sintang	60 IKM	70 IKM	80 IKM	90 IKM	100 IKM	115 IKM	455 IKM
40	Terbinanya kelompok IKM	0	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	50 kelompok
41	Terlatihnya kemampuan pelaku IKM	0	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	90 orang
42	Terlatihnya kemampuan siswa sekolah kejuruan	0	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100 orang
43	Tersedianya Perda mengenai Klaster Industri	0	0	1 Perda	0	0	0	1 Perda
44	Tersedianya sarana dan prasarana Kompetensi Inti Industri Daerah	0	0	0	1 KIID	0	0	1 KIID
45	Terbentuknya Road Map Kawasan Industri	0	0	0	1 dokumen	0	0	1 Dokumen
46	Terbangunnya Kawasan Industri	0	0	0	1 KI	0	0	1 Kawasan Industri
47	Terbinanya Industri kerajinan rakyat	0	2 Piagam UPAKARTI	2 Piagam UPAKARTI	2 Piagam UPAKARTI	2 Piagan UPAKARTI	2 Piagam UPAKARTI	10 Piagam
48	Tersedianya sarana untuk mempromosikan produk IKM	4 event	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event	20 Event

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Terbentuknya OVOP	0	0	1 OVOP	0	0	0	1 OVOP
50	Terbinanya IKM	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	100 kelompok
51	Terlatihnya kemampuan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan	4 Kelompok	3 kelompok	1 kelompok	0	0	0	4 kelompok
52	Tercapainya kemampuan pengolahan DAMIU	0	1 x	0	1x	0	1x	3 x
53	Terlatihnya kelompok IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	2 IKM	10 IKM
54	Terlatihnya kemampuan pelaku IKM	0	0	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	20 kelompok
55	Terlatihnya kemampuan berinovasi pada IKM unggulan	0	5 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM	25 IKM
56	Terlatihnya kemampuan penguasaan teknologi tepat guna pada IKM unggulan	0	0	5 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM	20 IKM
57	Tercapainya peningkatan sistem produksi pada IKM unggulan	0	0	0	5 IKM	5 IKM	5 IKM	15 IKM
58	Tersedianya sarana informasi yang dapat diakses oleh umum	0	1 web	0	0	0	0	1 Web
59	Terpeliharanya website sarana informasi	0	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	10 orang

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2017

BAB VII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, merupakan pedoman dan dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan berfungsi sebagai acuan operasional dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karenanya Renstra ini memiliki arti penting sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan program kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, tidak akan dapat memberikan arah dalam penyelenggaraan secara baik jika tidak dipahami secara tepat dan benar tentang substansi, semangat dan maksud yang terkandung di dalamnya. Berkenaan dengan hal tersebut Renstra sebagai dokumen perencanaan merupakan amanat pembangunan dan harus dilakukan dengan komitmen yang kuat, konsisten, kerjasama dan tanggung jawab dari seluruh aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Dan akhirnya semoga Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sintang, mampu untuk terwujudnya Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang maju dan mandiri, serta Tuhan Yang Maha Esa memberkati. Amin.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sintang

H. SUDIRMAN, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611216 198403 1 005